



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA



LMCK

LAPORAN MONITORING
CAPAIAN KINERJA | 2024



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAMBI



Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2024

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi
Tahun 2024

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	1. Pande Gede Semarapura, S.Kom., M.Si. 2. Dina Safitri	1. Penyusun Rencana dan Pelaporan 2. Pengadministrasi Perkantoran	17/04/24 17/04/2024	
2.	Diperiksa	Herry Wanda	Kepala Subbagian Tata Usaha	17/4/24	
3.	Disetujui	Herry Wanda	Kepala Subbagian Tata Usaha	17/4/24	



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA



KATA PENGANTAR



KATA PENGANTAR

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAMBI

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi mengemban amanah menjadi organisasi pemerintah yang profesional, yang dapat memfasilitasi dan mendukung mobilitas masyarakat melalui suatu layanan transportasi darat.

Sebagai institusi publik, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi secara akuntabel. Laporan Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi yang didalamnya menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kinerja tersebut dan realisasi



Penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



Adapun isi dari Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I ini mencakup Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2020-2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Pengukuran Kinerja Tahun 2024, serta tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja Tahun 2024.

Kami berharap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat memberikan penjelasan pertanggungjawaban terhadap berbagai pelaksanaan kegiatan serta dapat memberikan manfaat secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun-tahun mendatang.

Dibuat di Jambi
Pada tanggal 17 April 2024

Kepala Balai,



Eko Indra Yanto

NIP. 19790220 200112 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA



RINGKASAN EKSEKUTIF



RINGKASAN EKSEKUTIF

Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Ma'aruf Amin melanjutkan kepemimpinannya melalui Kabinet Indonesia Maju periode Tahun 2019-2024 mengusung Visi "Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong". Visi tersebut diterjemahkan lebih ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang tertuang dalam RPJMN periode 2020-2024. Pencapaian Visi Kabinet Kerja tersebut dapat terwujud apabila segenap jajaran pemerintahan menjalankan tugas dan fungsinya secara tepat dan optimal, yang direfleksikan dari pencapaian kinerja dalam mendukung agenda prioritas nasional.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2020-2024, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi telah menetapkan Visi yang merupakan pengejawantahan dari Visi Kementerian Perhubungan 2020-2024 dalam rangka mendukung terwujudnya Visi Presiden Republik Indonesia 2020-2024, yaitu : Perhubungan Darat yang andal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden : "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong".

Rencana Strategis (Renstra) memuat 5 (lima) tujuan Pembangunan sub sektor Perhubungan Darat, yakni :

1. Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi;
2. Meningkatnya pelayanan transportasi darat;
3. Meningkatnya keselamatan transportasi darat;

4. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat;
5. Meningkatnya birokrasi ditjen perhubungan darat akuntabel.

Dari tujuan diatas, dapat dijabarkan secara konkret ke dalam Sasaran Program. Setiap sasaran tersebut disertai dengan ukuran sebagai alat untuk mengetahui pencapaian sasaran dimaksud. Pada Tahun 2023, ditetapkan 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK) dan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), beserta targetnya.

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan evaluasi kinerja tahun 2024, secara keseluruhan kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi sudah baik.

Dari 12 (dua belas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi tahun 2024, terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan sama dengan 100% (IKP=100%) dan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Kegiatan kurang dari 100% ($0\% \leq \text{IKP} \leq 100\%$). Adapun rincian capaian untuk setiap Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan jalan terealisasi sebesar 23,85% (target 100%);
2. Jumlah terminal tipe a dan terminal barang yang beroperasi terealisasi sebesar 4 lokasi (target 4 lokasi);
3. Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi terealisasi 4 lokasi (target 4 lokasi);
4. Persentase pelaksanaan SPM di Terminal Tipe A terealisasi 87% (target 95%);
5. Persentase pelaksanaan SPM di Pelabuhan SDP terealisasi 80% (target 100%);
6. Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal terealisasi 22% (target 100%);
7. Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat terealisasi 0,18% (target 1%);
8. Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS dan batas kecepatan terealisasi 0 lokasi (target 10 lokasi);

9. Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan terealisasi 0 orang (target 1.500 orang);
10. Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor terealisasi 44% (target 80%);
11. Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran terealisasi 0 Lokasi (target 1 Lokasi)
12. Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat tercapai 13,5 (target 90);
13. Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat tercapai 18 (target 90).

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan manajemen dan meningkatkan akuntabilitas kinerja guna meningkatkan pelayanan publik dan kepercayaan publik. Hal ini dicerminkan dengan upaya perbaikan atas setiap sistem manajemen yang dimiliki, antara lain melalui penerapan redesain sistem perencanaan dan penganggaran (RSPP), pelaksanaan program reformasi birokrasi, serta adaptasi terhadap teori/praktik terbaik dan terkini.



PENDAHULUAN

AKUNTABILITAS
KINERJA

PENUTUP

LAMPIRAN

BAB I

BAB II

BAB III

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*), maka diperlukan akuntabilitas publik sebagai pedoman penyelenggaraannya. Akuntabilitas ini merupakan salah satu kriteria yang harus dipenuhi oleh setiap Instansi Pemerintah yang dalam hal ini sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya berdasarkan suatu perencanaan strategi yang ditetapkan oleh masing masing instansi pemerintah tersebut kepada masyarakat. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kementerian Perhubungan, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi sebagai bagian dari instansi pemerintah wajib membuat Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2023.

I.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Balai Pengelola Transportasi Darat atau disingkat BPTD merupakan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Balai Pengelola Transportasi Darat dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat telah terjadi perubahan organisasi dan tata kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, Balai

Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi menjadi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi merupakan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat dengan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas :

Balai Pengelola Transportasi Darat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Terminal Tipe A, Terminal barang untuk umum, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor, dan Pelabuhan Sungai, Danau, Penyeberangan, Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Sarana, Prasarana, Lalu lintas dan angkutan, serta Keselamatan dan Keamanan Pelayaran Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.

b. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas, Balai Pengelola Transportasi Darat menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. Pelaksanaan pengelolaan Terminal Tipe A, Terminal barang untuk umum, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor, dan Pelabuhan Sungai, Danau, Penyeberangan;
3. Pelaksanaan pengendalian keselamatan sarana dan angkutan jalan, keselamatan dan keamanan pelayaran sungai, danau dan penyeberangan, serta melaksanakan kegiatan keperintisan;
4. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengendalian lalu lintas jalan, sungai, danau dan penyeberangan;
5. Pelaksanaan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan;
6. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, sumber daya manusia, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat; dan
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi terdiri atas:

1. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, dan laporan evaluasi kinerja, pengelolaan urusan keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, serta pelaporan Sistem Akuntansi Instansi, urusan sumber daya manusia, hukum, hubungan masyarakat, persuratan,

kearsipan dan dokumentasi, pelayanan informasi publik, perlengkapan, rumah tangga, serta evaluasi dan pelaporan.

2. Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pengembangan, pelayanan jasa, dan pengoperasian Terminal Tipe A, Terminal barang untuk umum, dan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor, Pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan, serta bantuan teknis fasilitas pendukung dan integrasi moda dan Pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan.

3. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan kalibrasi peralatan pengujian berkala dan pemeriksaan kesesuaian fisik rancang bangun kendaraan bermotor, pemeriksaan dan sertifikasi kelaiklautan kapal, analisis trayek angkutan jalan antar kota antar provinsi dan angkutan jalan yang disubsidi oleh pemerintah pusat, penetapan jadwal operasi, pemberian subsidi angkutan jalan dan pelayaran perintis sungai, danau, dan penyeberangan, serta bantuan teknis penyediaan sarana jalan, sungai, danau, dan penyeberangan.

4. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan

Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan untuk jaringan jalan nasional, penyediaan, pengoperasian, dan pemeliharaan perlengkapan jalan, rambu sungai dan danau, sarana bantu navigasi pelayaran, dan sistem informasi manajemen lalu lintas sungai, danau, dan penyeberangan, pengerukan dan reklamasi di kolam Pelabuhan penyeberangan dan alur sungai dan danau, pemberian rekomendasi laik fungsi jalan nasional non-tol, pemberian bantuan teknis perlengkapan jalan, halte dan rambu sungai danau, pengamatan dan pemantauan perusahaan angkutan jalan, kegiatan karoseri, penyelenggara pengujian berkala kendaraan bermotor, Pelabuhan dan penyelenggara Pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, kendaraan bermotor di jalan, tarif angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, pemberian subsidi angkutan jalan, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pemenuhan perlengkapan jalan, persetujuan teknis analisis dampak lalu lintas, pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan, pemenuhan kelaiklautan kapal sungai, danau, dan penyeberangan,

ketepatan waktu pelayanan, dan pemberian subsidi angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, sarana bantu navigasi pelayaran sungai, danau, kegiatan pengerukan dan reklamasi di kolam Pelabuhan penyeberangan dan alur sungai danau, dan pemanfaatan bantuan teknis, pelaksanaan kegiatan kesyahbandaran pada Pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, serta patroli dan pengamanan pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat sesuai dengan keahlian dan keterampilan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



ORGANISASI BPTD KELAS II JAMBI



Kepala BPTD Kelas II Jambi
Eko Indra Yanto, S.SiT., MT



Subbag Tata Usaha
Herry Wanda, A.Md LLAJ, S.Sos., M.A.P



Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
Yuliana Y. S. Panjaitan, S.SiT., MM



Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
Harwinanto, S.E., M.T



Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan
Yuliansyah, S.SiT., MM

Satuan Pelayanan

Kelompok Jabatan Fungsional

- Pengawas Satpel Terminal Tipe A Alam Barajo Kota Jambi
- Pengawas Satpel Terminal Tipe A Sribulan Kab. Sarolangun
- Pengawas Satpel Terminal Tipe A Muara Bungo Kab. Bungo
- Pengawas Satpel Terminal Tipe A Bangko Kab. Merangin
- Pengawas Satpel UPPKB Jambi Merlung Kab. Muaro Jambi
- Pengawas Satpel UPPKB Muara Tembesi Kab. Batanghari
- Pengawas Satpel UPPKB Pelawan Sarolangun Kab. Sarolangun
- Pengawas Satpel Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal
- Pengawas Satpel Pelabuhan Sungai PS. Angso Duo
- Pengawas Satpel Pelabuhan Sungai Nipah Panjang
- Pengawas Satpel Pelabuhan Sungai Mendahara



I.3. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah Pegawai di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II adalah sebanyak 331 orang dengan rincian 166 Orang PNS dan PPPK dan 165 Orang PPNP dengan pembagian wilayah kerja sebagai berikut :

Tabel I. 1 Sumber Daya Manusia Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II

NO	UNIT KERJA	JUMLAH		TOTAL
		PNS/PPPK	PPNP	
1	KANTOR INDUK BPTD KELAS II JAMBI	49	31	80
2	TERMINAL TIPE A ALAM BARAJO KOTA JAMBI	16	26	42
3	TERMINAL TIPE A MUARA BUNGO KAB. BUNGO	16	19	35
4	TERMINAL TIPE A PULAU TUJUH BANGKO KAB. MERANGIN	12	17	29
5	TERMINAL TIPE A SRIBULAN KAB. SAROLANGUN	11	14	25
6	UPPKB JAMBI MERLUNG	15	25	40
7	UPPKB PELAWAN SAROLANGUN	14	10	24
8	UPPKB MUARA TEMBESI	22	17	39
9	UPPKB SUNGAI PENUH	-	1	1
10	PELABUHAN PENYEBERANGAN KUALA TUNGKAL	2	5	7
11	PELABUHAN SUNGAI PS. ANGSO DUO	3		
12	PELABUHAN SUNGAI NIPAH PANJANG	3		
13	PELABUHAN SUNGAI MENDAHARA	3		
JUMLAH		166	165	331

I.4. POTENSI, ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN

Untuk mencapai tujuan organisasi maka perlu disusun program kerja, melalui program kerja akan terlihat tahapan-tahapan yang dilakukan serta dukungan materi atau bahan lain yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya. Dalam penyusunan program kerja/ kegiatan ini ada beberapa persyaratan/ kriteria yang perlu dipenuhi. Beberapa kriteria tersebut antara lain:

- 1) Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
- 2) Penataan dan pembinaan SDM transportasi darat;
- 3) Perencanaan anggaran dan proses pengadaan.

I.5. SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Monitoring Capaian Kinerja (LMCK) Triwulan I ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Tugas Pokok dan Fungsi
 - I.2.1 Bagan Struktur Organisasi
- I.3 Sumber Daya Manusia
- I.4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan
- I.5 Sistematika Laporan
- I.6 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2024
 - I.6.1 Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024
- I.7. Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2024

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

- II.1 Tahapan Pengukuran Kinerja
- II.2 Pengukuran Capaian Kinerja
 - II.2.1. SK.1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi
 - II.2.1.1 IKK 1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan
 - a.1) Definisi Indikator Kinerja
 - a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024

a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.1.2 IKK 1.3 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi

a.1) Definisi Indikator Kinerja

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024

a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.1.3 IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi

a.1) Definisi Indikator Kinerja

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024

a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.2. SK. 2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat

II.2.2.1 IKK 2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A

a.1) Definisi Indikator Kinerja

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024

a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.2.2 IKK 2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP

a.1) Definisi Indikator Kinerja

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024

a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.3. SK. 4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat

II.2.3.1 IKK 3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal

- a.1) Definisi Indikator Kinerja
 - a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024
 - a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- II.2.3.2 IKK 3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
- a.1) Definisi Indikator Kinerja
 - a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024
 - a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- II.2.3.3 IKK 3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan
- a.1) Definisi Indikator Kinerja
 - a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024
 - a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- II.2.3.4 IKK 7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor
- a.1) Definisi Indikator Kinerja
 - a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024
 - a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- II.2.3.5 IKK 7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP
- a.1) Definisi Indikator Kinerja
 - a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024
 - a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- II.2.4 SK. 5 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat

II.2.4.1 IKK 5.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal

- a.1) Definisi Indikator Kinerja
- a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.5 SK. 1 Meningkatnya birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel

II.2.5.1 IKK 1 Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

- a.1) Definisi Indikator Kinerja
- a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.3 Realisasi Anggaran

II.3.1. Alokasi Anggaran Tahun 2024

1. Pagu Anggaran
 - a. Rincian Per Sumber Dana Pagu Awal Tahun 2024
 - b. Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2024
 - c. Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran
2. Refocusing Anggaran Tahun 2024
 - a. Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2024
 - b. Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun 2024
 - c. Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2024
 - d. Rincian Realokasi Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2024
3. Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2020 - 2024

II.3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2023

1. Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2024
2. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2024
3. Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2024
4. Analisis Dana Yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja

II.3.3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan
2. Hambatan dan Kendala

BAB III PENUTUP

III.1 Penutup

III.1.1 Ringkasan Capaian

III.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

LAMPIRAN

1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024;
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024;
3. Rencana Aksi Tahun 2024;
4. Monitoring Rencana Aksi Tahun 2024;
5. Lain-lain yang dianggap perlu.

I.6. Uraian Singkat Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi saat ini telah mengacu dan menggunakan Revisi Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi dikarenakan adanya Revisi Rencana Strategis dengan Nomenklatur terbaru di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan perubahan pada target Indikator Kinerja Kegiatan pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi.

Revisi Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2020 – 2024 merupakan rencana yang disusun untuk memberikan gambaran tentang Visi, Misi, Tujuan Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program BPTD Kelas II Jambi dalam kurun waktu 2020 – 2024 sebagai masukan dalam penyusunan Draft Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 - 2024 agar bersinergi dan mempunyai kesatuan arah dan tujuan.

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat, yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat.

Guna mencapai sasaran, maka sebagai acuan ukuran kinerja ditetapkan indikator kinerja kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Revisi Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2020 - 2024, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel I.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2020-2024 sesuai Revisi Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2020 – 2024

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET S.D 2024
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	100
		IKK1.2 Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antar moda	Lokasi	5	-
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	4	4
		IKK1.4 Jumlah Penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	-	-
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	-
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	7	4
SK2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	80	100
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	100	100
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	50	100
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	2	0

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET S.D 2024
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
		IKK3.3 Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan Zoss, RASS dan batas kecepatan	Lokasi	30	50
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	500	2000
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	50	100
		IKK7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Lokasi	50	1
SK5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	80	90
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK6.1 Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	80	90

I.6.1 Uraian / Narasi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2024

Perencanaan kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan berdasarkan Indikator Kinerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ini ditetapkan rencana capaian kinerja Tahun 2024 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Rencana Kinerja Tahunan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2024 terdiri atas Indikator Kinerja Kegiatan guna mencapai sasaran dengan target yang akan dicapai. Rencana Kinerja Tahunan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel I.3 Rencana Kinerja Tahunan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	4
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4
2	SK2 Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	95
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	100
3	SK4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	1
		IKK3.3 Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS dan batas kecepatan	Lokasi	10

		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1500
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	80
		IKK7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Lokasi	1
4	SK5 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
5	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1 Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

I.7. Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja sampai dengan Triwulan I mengacu pada Perjanjian Kinerja awal. Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi merupakan kontrak kinerja antara Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi dengan Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan harus dilaksanakan dalam Tahun 2024 dan merupakan indikator yang didukung melalui pendanaan APBN.

Indikator kinerja kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat dengan Total Anggaran sebesar Rp. 88.970.577.000,- adalah sebagai berikut:

Tabel I.4 Perjanjian Kinerja Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Jambi Tahun 2024

 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2024					
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA					
Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2024					
No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Pande Gede Semarapura, S.Kom., M.Si.	Penyusun Rencana dan Pelaporan	3-1-2024	
		Dina Safitri, S.H.	Pengadministrasi Perkantoran	3-1-2024	
2.	Disetujui	Herry Wanda, S.Sos., M.A.P	Kepala Subbagian Tata Usaha	3-1-2024	
		Yuliana Y.S Panjaitan, S.SiT., M.M.	Kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan	3-1-2024	
		Harwinanto, S.E., M.T.	Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan	3-1-2024	
		Yuliansyah, S.SiT., M.M.	Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan	3-1-2024	



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eko Indra Yanto

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Drs. Hendro Sugiatno, M.M.

Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.

Jambi, 3 Januari 2024
Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Jambi

EKO INDRA YANTO
NIP. 19790220 200112 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAMBI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	4
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4
2	SK2 Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	95
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	100
3	SK4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	1
		IKK3.3 Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS dan batas kecepatan	Lokasi	10
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1500
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	80
		IKK7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Lokasi	1
4	SK5 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
5	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1 Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

KEGIATAN	ANGGARAN
1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 17.500.000.000
2. Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 9.582.899.000
3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 33.625.548.000
4. Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 4.143.720.000
5. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	Rp. 262.000.000
6. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp. 6.222.823.000
7. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp. 17.633.587.000

Disetujui
Direktur Jenderal Perhubungan Darat



Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.

Jambi, 3 Januari 2024
Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Jambi



EKO INDRA YANTO
NIP. 19790220 200112 1 001



PENDAHULUAN

AKUNTABILITAS
KINERJA

PENUTUP

LAMPIRAN

BAB I

BAB II

BAB III

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

II.1. Tahapan Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah dikaitkan dengan sejauh mana organisasi tersebut telah melakukan upaya-upaya strategis dan operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka pemenuhan visi dan misinya. Mekanisme pengelolaan kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi melalui aplikasi E-performance dimulai dari target-target yang telah ditetapkan dalam PK yang kemudian dilakukan pengukuran dan pelaporan, monitoring dan evaluasi secara berkala melalui aplikasi *E-performance* yang berbasis web. Pelaksanaan pengelolaan pengukuran kinerja dilakukan sepanjang tahun yang meliputi proses penginputan, validasi, dan pelaporan secara berkala setiap awal bulan.

II.2. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja. Tahapan Pengukuran Kinerja dilakukan melalui sistem aplikasi berbasis web *E-Performance* yang menyediakan fasilitas Inputing, updating dan monitoring pengukuran kinerja per bulan maupun triwulan yang dapat dimanfaatkan unit kerja Eselon I, II dan III mandiri di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dengan alamat <http://www.eperformance.dephub.go.id> dimana dengan menggunakan sistem aplikasi ini pelaksanaan monitoring dapat dilakukan secara intensif sehingga penyelenggaraan manajemen kinerja organisasi menjadi optimal.

Guna memudahkan penggunaan sistem aplikasi tersebut, terus dilakukan upaya penyempurnaan atas sistem aplikasi tersebut agar para operator pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat lebih mudah menggunakan sistem aplikasi, di samping itu diupayakan pula bagi setiap operator yang bertugas menjalankan/melaksanakan sistem aplikasi dapat diberikan reward atas hasil kerjanya dan penilaian unit kerja masing-masing.

Melalui penggunaan aplikasi ini dapat dijadikan evaluasi rutin atas capaian kinerja secara periodik tiap bulannya, di mana hal ini menjadi salah satu materi yang direkomendasikan Tim Evaluator SAKIP dari Kementerian PAN dan RB, dimana gilirannya dapat meningkatkan nilai capaian hasil evaluasi SAKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dimasa mendatang.

Metode Pengukuran

Dalam menentukan nilai pengukuran kinerja, hasil pengukuran kinerja dimaksud disampaikan dalam bentuk Prosentase. Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran kinerja Persentase pencapaian untuk Indikator Kinerja Kegiatan adalah sebagai berikut:

Prosentase Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah ditetapkan cara perhitungan Persentase capaian kinerja sebagai berikut:

- a. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- b. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin buruk, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2024

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran terhadap realisasi kinerja dan juga analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Pengukuran capaian kinerja meliputi:

1. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dan analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan, serta alternatif solusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2024;
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 Dalam Revisi Renstra BPTD Kelas II Jambi Tahun 2020-2024.

Analisis dan Evaluasi kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran kinerja BPTD Kelas II Jambi, diperoleh berdasarkan data realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan. Bermuara pada terwujudnya 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK) yang ingin dicapai pada periode 2020-2024.

Tabel II. 1 Pengukuran Kinerja BPTD Kelas II Jambi Triwulan I Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	Q1			Q2			Q3			Q4		
				T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi														
IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	100	23,85	23,85									
IKK 1.3	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	Lokasi	4	4	4	100									
IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4	4	4	100									
SK2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan transportasi darat														
IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A	%	95	95	82,6	87,02									
IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	%	100	100	80,3	80,3									

LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2024

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	Q1			Q2			Q3			Q4		
				T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat														
IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	100	22	22									
IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	1	1	17,82	15,82									
IKK 3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS dan batas kecepatan	Lokasi	10	10	0	0									
IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1500	0	0	0									
IKK 7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	80	80	44	55									
IKK 7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Lokasi	1	1	0	0									

LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2024

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	Q1			Q2			Q3			Q4		
				T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
SK5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat														
IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	90	13,5	15									
SK1	Meningkatnya birokrasi Ditjen Perhubungan Darat akuntabel														
IKK 1	Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90	90	18	20									
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran Kegiatan															
Rata-Rata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan															
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% (IKK≥100%)					3										
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan kurang dari 100% (0%≤IKK<100%)					10										

Selama tahun 2024, ada 5 Sasaran Kegiatan (SK) dan di dalamnya ada 13 IKK Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi. Penjelasan capaian IKK untuk setiap Sasaran Kegiatan adalah sebagai berikut:

2.2.1 Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi merupakan salah satu Unit Kerja di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang mempunyai peran strategis dalam melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan di bidang transportasi darat yang dirumuskan dalam Revisi Renstra BPTD Kelas II Jambi Tahun 2020-2024. Kegiatan pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan dan dilaksanakan memiliki daya saing dan nilai tambah serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Untuk mendukung kebijakan tersebut strategi yang dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi adalah dengan mewujudkan pelayanan transportasi darat yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas dan peningkatan angkutan perkotaan.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1 diukur melalui 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1. IKK 1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan
2. IKK 1.3 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi
3. IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi

IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan

a.1) Definisi Indikator Kinerja

Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan adalah perbandingan antara jumlah pelayanan angkutan perintis di jalan dengan jumlah pelayanan yang direncanakan.

Penyelenggaraan angkutan jalan perintis dilaksanakan berdasarkan jaringan trayek angkutan orang yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Capaian kinerja persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan dihitung berdasarkan jumlah trayek angkutan perintis yang dilayani.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan digunakan rumus sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Realisasi RIT}}{\text{Target RIT}} \times 100\%$$

Keterangan:

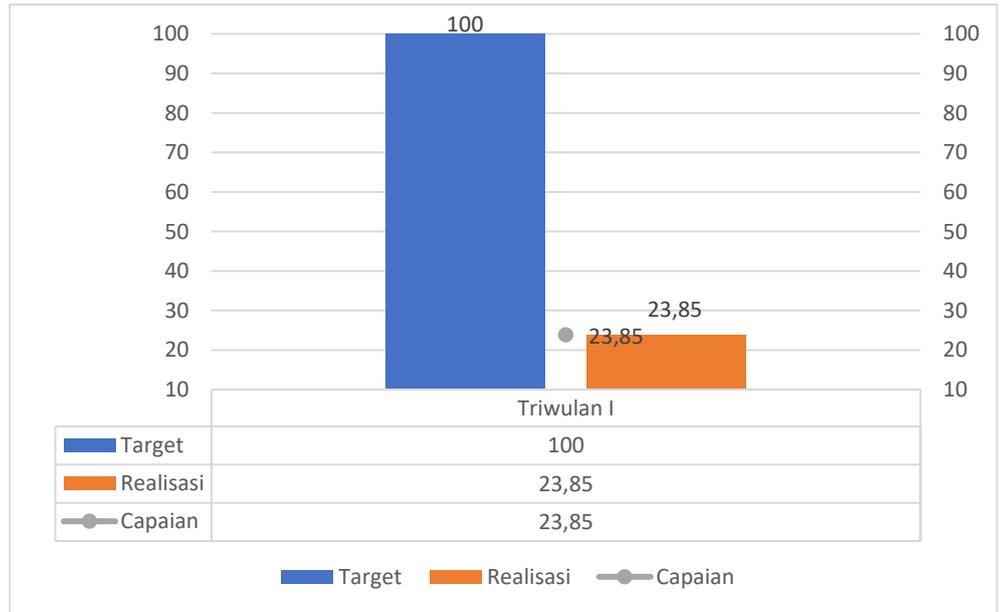
Trayek yang dilayani adalah:

1. Desa Sungai Jernih – Terminal Tipe C Rimbo Bujang;
2. Desa Tanah Tumbuh – Sp. Niam – Terminal Muara Bulian;
3. Desa Bangun Seranten – Terminal Bungo;
4. Desa Belukar Panjang – Terminal Tipe A Muara Bungo;
5. Desa Sari Mulya – Terminal Tipe A Muara Bungo;
6. Desa Suo-Suo – Terminal Tipe C Rimbo Bujang;
7. Desa Pelayung – Terminal Tipe C Rimbo Bujang;
8. Desa Mekar Jaya – Terminal Muara Bulian – Terminal Alam Barajo Jambi.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Capaian Kinerja Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Tahun 2024 sebesar 23,85% jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 23,85%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan dibawah ini :

LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2024



Gambar II.1 Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024 IKK Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

a. Dasar Hukum

1. UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 73 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Jalan Perintis;
3. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
4. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP-DRJD 8317 Tahun 2023 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2024;
5. Revisi Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2020 – 2024.

b. Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2024 Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan memiliki target 100% yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dan target pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi.

c. Faktor-faktor keberhasilan:

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan sebagai berikut :

1. Dipengaruhi oleh komitmen antara Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi dan pemerintah daerah dalam kegiatan pengembangan dan peningkatan pelayanan keperintisan angkutan jalan.
2. Masih diperlukannya angkutan keperintisan di daerah yang belum terjangkau oleh angkutan umum.
3. Angkutan keperintisan menjadi salah satu pilihan transportasi yang murah.

d. Faktor-faktor kegagalan:

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan sebagai berikut :

1. Kurangnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan perintis yang telah disediakan
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang adanya angkutan keperintisan
3. Kurangnya SDM.

e. Perhitungan Realisasi Kinerja

Realisasi Kinerja Indikator Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan pada Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan I mencapai 23,85%.

f. Perhitungan Capaian Kinerja

Realisasi Capaian Kinerja Indikator Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan pada Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{23,85}{100} \times 100\% = 23,85\%$$

Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan sampai dengan Triwulan I mencapai 23,85%.

g. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Adapun pagu anggaran terkait Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp.5.000.000.000 Adapun realisasi anggaran sebesar Rp.1.197.034.500.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Perencanaan yang komprehensif dalam menentukan rute / trayek angkutan perintis di Provinsi Jambi dengan memperhatikan RPJMN, Renstra, serta kebutuhan masyarakat terhadap layanan angkutan perintis di lapangan.
2. Komitmen antara Pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam kegiatan peningkatan konektivitas transportasi darat terutama di daerah-daerah terisolir dan belum terlayani angkutan umum.
3. Dapat terus Mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dalam pelayanan jasa angkutan umum.
4. Meningkatkan kualitas layanan dari moda angkutan darat.
5. Dapat terus Mewujudkan pelayanan jasa angkutan yang handal.
6. Selalu Menciptakan rasa nyaman dan efisiensi terhadap pengguna jasa angkutan umum.
7. Dapat Mewujudkan konektivitas transportasi darat.

2.2.1.2. IKK 1.3 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi

a.1) Definisi Indikator Kinerja

Terminal Tipe-A yang Beroperasi merupakan Terminal Tipe-A yang telah selesai dibangun dan telah beroperasi. Terminal Tipe-A adalah Terminal Tipe-A yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sedangkan Terminal Barang yang Beroperasi merupakan Terminal Barang yang telah selesai dibangun dan telah melayani Angkutan Barang di Jalan.

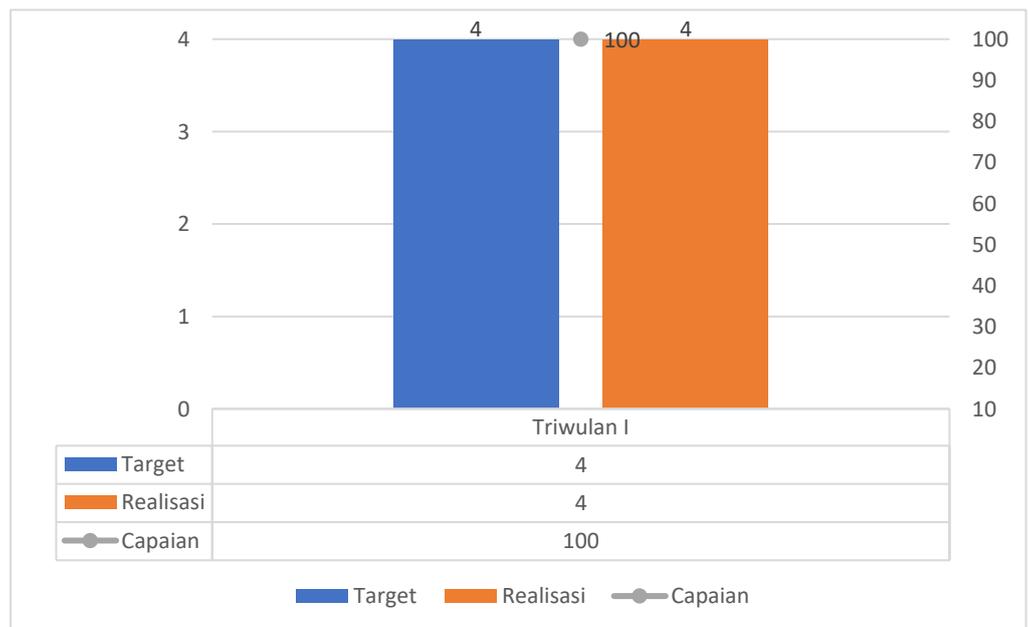
Indikator kinerja kegiatan tersebut merupakan kegiatan penyelenggaraan kelancaran operasional Terminal Tipe A dan memastikan tata Kelola sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan

secara efisien dan efektif. Terminal Tipe A yang beroperasi di Provinsi Jambi ada 4 Terminal diantaranya adalah:

1. Terminal Tipe A Alam Barajo Kota Jambi;
2. Terminal Tipe A Sribulan Sarolangun;
3. Terminal Tipe A Pulau Tujuh Bangko Merangin;
4. Terminal Tipe A Muara Bungo.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Capaian Kinerja Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi Tahun 2024 sebesar 4 lokasi jika dibandingkan dengan target PK Tahun 2024 sebesar 4 lokasi, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK.



Gambar II.2 Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024 IKK Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan;

2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
3. Revisi Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2020 – 2024.

b. Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2024 Indikator Kinerja Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi memiliki target 100% yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dan target pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi.

c. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan persentase Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi sebagai berikut :

1. Tingginya antusias masyarakat menggunakan angkutan umum.
2. Informasi tentang pelayanan diterminal tersampaikan kepada masyarakat
3. Banyak masyarakat yang menggunakan terminal sebagai tempat perpindahan koridor.

d. Faktor-faktor Kegagalan :

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi sebagai berikut :

- Kurangnya sumber daya manusia;
- Tidak adanya anggaran operasional;
- Sarana dan prasarana yang tidak memadai.

e. Perhitungan Realisasi Kinerja

Realisasi Kinerja Indikator Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi pada Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan I mencapai 4 lokasi.

f. Perhitungan Capaian Kinerja

Realisasi Capaian Kinerja Indikator Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi pada Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$$

Persentase Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi sampai dengan Triwulan I mencapai 100%.

g. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Adapun pagu anggaran terkait Indikator Kinerja Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp.8.233.829.000 Adapun realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I sebesar Rp. 1.785.887.515.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu :

1. Meningkatkan pelayanan kepada para penumpang;
2. Meningkatkan fasilitas para penumpang;
3. Melakukan pengawasan secara optimal terhadap transportasi jalan.

2.2.1.3. IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi

a.1) Definisi Indikator Kinerja

Pelabuhan Penyeberangan adalah Pelabuhan laut yang digunakan untuk angkutan penyeberangan. Pelabuhan Penyeberangan adalah Pelabuhan penyeberangan Kelas I, Kelas II, dan Kelas III. Sedangkan Pelabuhan Sungai dan Danau adalah Pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan Sungai, Danau, Waduk, dan Terusan. Pelabuhan Sungai dan Danau adalah Pelabuhan pengumpul dan pengumpan. Pelabuhan SDP yang Beroperasi merupakan Pelabuhan SDP yang dibangun melalui APBN.

Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan di wilayah BPTD Kelas II Jambi berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 yaitu:

1. Pelabuhan penyeberangan Kuala Tungkal;
2. Pelabuhan sungai Ps. Angso duo;
3. Pelabuhan sungai Nipah Panjang;
4. Pelabuhan sungai Mendahara.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 IKK Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi memiliki target 4 Lokasi dengan capaian realisasi sebesar 4 Lokasi. 4 Lokasi Pelabuhan SDP yang beroperasi tersebut yaitu :

1. Pelabuhan sungai penyeberangan kuala tungkal;
2. Pelabuhan sungai Angso duo;
3. Pelabuhan sungai Mendahara tengah;
4. Pelabuhan sungai Nipah Panjang.

Capaian Kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi Tahun 2024 sebesar 4 Lokasi jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebesar 4 Lokasi, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK



Gambar II.3 Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024 IKK Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 61 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau;
3. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;

4. Revisi Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2020 – 2024.

b. Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2024 Indikator Kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi memiliki target 100% yang diperoleh dari capaian terhadap Perjanjian Kinerja di Tahun sebelumnya dan target pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi.

c. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi sebagai berikut :

1. Tersedianya anggaran;
2. Melakukan peningkatan kualitas sarana dan prasaran Pelabuhan;
3. Pengawasan operasional Pelabuhan;
4. Petugas yang kompeten dibidangnya;
5. Koordinasi yang selalu terjalin dengan stakeholder terkait;
6. Selalu melaksanakan evaluasi kerja.

d. Faktor-faktor Kegagalan :

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi sebagai berikut :

1. Tidak adanya anggaran;
2. Minimnya pelaksanaan peningkatan kualitas sarana dan prasarana Pelabuhan;
3. Tidak optimalnya pengawasan operasional pelabuhan.

e. Perhitungan Realisasi Kinerja

Realisasi Kinerja Indikator Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi pada Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan I mencapai 4 lokasi.

f. Perhitungan Capaian Kinerja

Realisasi Capaian Kinerja Indikator Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi pada Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$$

Persentase Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi sampai dengan Triwulan I mencapai 100%.

g. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Adapun pagu anggaran terkait Indikator Kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 1.349.070.000 Adapun realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I sebesar Rp. 107.291.587.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu dengan :

1. Berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan dan ketepatan jadwal di lapangan;
2. Melakukan pengawasan secara periodik;
3. Melakukan pembangunan prasarana pelabuhan berdasarkan rencana induk Pelabuhan yang telah disusun.
4. Terpenuhinya persyaratan keselamatan yang menyangkut angkutan di sungai danau dan penyeberangan;
5. Menjamin kesesuaian spesifikasi teknis fisik kendaraan;
6. Peningkatan keamanan dan ketertiban pelabuhan SDP.

2.2.2. Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi merupakan salah satu Unit Kerja di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang mempunyai peran strategis dalam melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan di bidang transportasi darat yang dirumuskan dalam Revisi Renstra BPTD Kelas II Jambi Tahun 2020-2024. Kegiatan pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan dan dilaksanakan memiliki daya saing dan nilai tambah serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Untuk mendukung kebijakan tersebut strategi yang dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi adalah dengan mewujudkan pelayanan transportasi darat yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas dan peningkatan angkutan perkotaan.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 2 diukur melalui 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1. IKK 2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A;
2. IKK 2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP.

2.2.2.1. IKK 2.1 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A

a.1) Definisi Indikator Kinerja

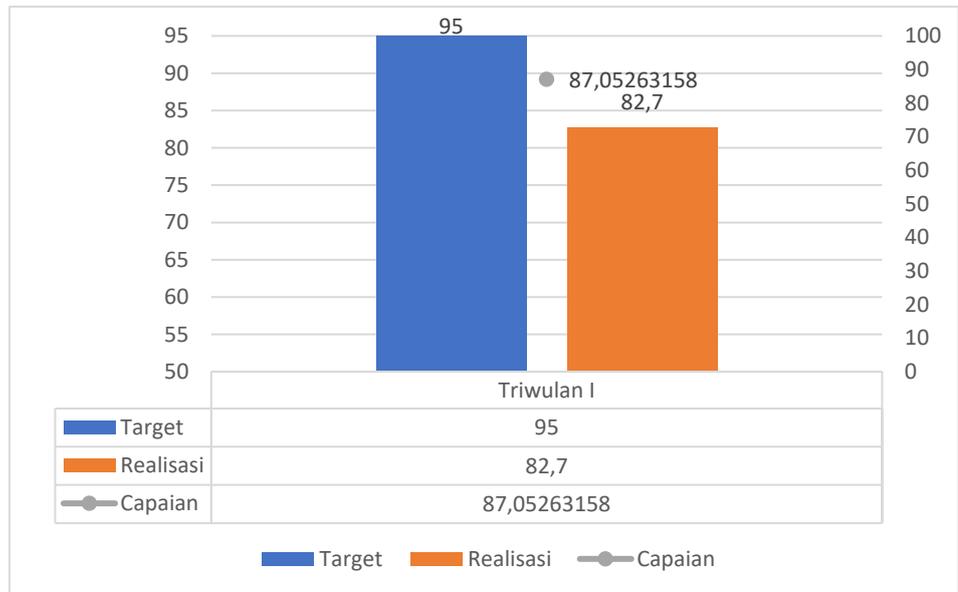
Pada IKK Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A, Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur Pasal 64 ayat (2) PM No. 24 Tahun 2021 meliputi:

1. Kinerja dan kompetensi sumber daya manusia
2. Pemanfaatan dan kebersihan fasilitas utama dan fasilitas penunjang;
3. Pelaksanaan standar operasional prosedur Terminal;
4. Pemanfaatan teknologi informasi; dan
5. Keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Capaian Kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A Tahun 2024 sebesar 82,6% jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebesar 95%, maka capaian kinerja mencapai 87,02%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK

LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2024



Gambar II.4 Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024 IKK Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A

a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan;
2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
3. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.4951/AJ.002/DRJD/2017 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksana Kebersihan, Ketertiban, dan Kenyamanan Terminal Penumpang Tipe A;
4. Renstra BPTD Kelas II Jambi Tahun 2020 – 2024.

b. Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2024 target perjanjian kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal tipe-A memiliki target 95%.

c. Faktor-faktor Keberhasilan:

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal tipe-A:

1. Sumber daya manusia yang mencukupi, terampil, dan berintegritas;

2. Komitmen Petugas dalam Pelayanan yang ada di Terminal Tipe-A;
3. Fasilitas yang ada dapat memenuhi kebutuhan masyarakat;
4. Terpenuhinya Keamanan, Kebersihan, Ketertiban yang ada di Terminal.

d. Faktor-faktor Keberhasilan:

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal tipe-A sebagai berikut :

1. Kurangnya sumber daya manusia;
2. Tidak adanya anggaran operasional;
3. Sarana dan prasarana yang tidak memadai.

e. Perhitungan Realisasi Kinerja

Realisasi Kinerja Indikator Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal tipe-A pada Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan I sebesar 82,7%.

f. Perhitungan Capaian Kinerja

Realisasi Capaian Kinerja Indikator Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal tipe-A pada Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{82,7}{95} \times 100\% = 87\%$$

Persentase Jumlah Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal tipe-A sampai dengan Triwulan I mencapai 87%.

g. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Adapun pagu anggaran terkait Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal tipe-A pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 1.354.000.000 Adapun realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I sebesar Rp. 24.723.492.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu :

1. Meningkatkan pelayanan kepada para penumpang;
2. Meningkatkan fasilitas para penumpang;

3. Melakukan pengawasan secara optimal terhadap transportasi jalan;
4. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan SPM di Terminal Tipe-A.

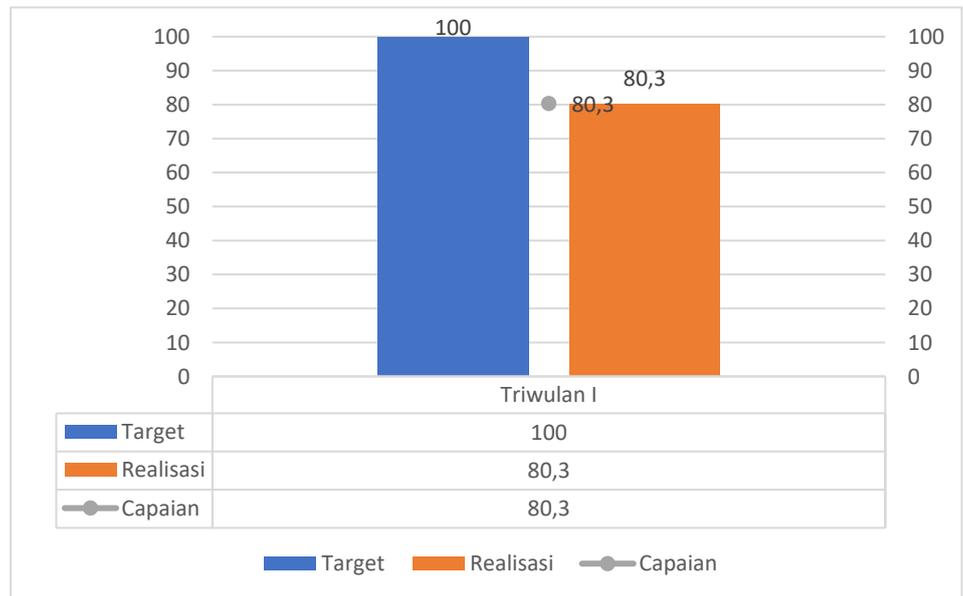
2.2.2.2. IKK 2.3 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP

a.1) Definisi Indikator Kinerja

Standar Pelayanan Minimum di Pelabuhan SDP adalah persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh Pelabuhan dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Capaian Kinerja Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP Tahun 2024 sebesar 80,3% jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebesar 100%, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK



Gambar II.5 Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024 IKK Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 62 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan;
2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
3. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 61 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau;
4. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
5. Revisi Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2020 – 2024.

b. Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2024 target perjanjian kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP memiliki target 100%.

c. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP sebagai berikut :

1. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai;
2. Kualitas SDM;
3. Pelaksanaan pengawasan secara periodik.

d. Faktor-faktor Kegagalan :

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP sebagai berikut :

1. Sarana dan prasarana tidak memadai
2. Kurangnya SDM;
3. Tidak optimalnya pelaksanaan pengawasan.

e. Perhitungan Realisasi Kinerja

Realisasi Kinerja Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP pada Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan I sebesar 80,3%.

f. Perhitungan Capaian Kinerja

Realisasi Capaian Kinerja Indikator Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP pada Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{80,3}{100} \times 100\% = 80,3\%$$

Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP sampai dengan Triwulan I mencapai 80,3%.

g. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Adapun pagu anggaran terkait Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 1.354.000.000. Adapun realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I sebesar Rp. 24.723.492.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu dengan :

1. Melakukan pengawasan secara periodik terhadap SPM di Pelabuhan SDP di Provinsi Jambi;
2. Melakukan sosialisasi terhadap perusahaan angkutan penyeberangan terkait SPM pelayanan angkutan penyeberangan;
3. Memberikan sanksi yang tegas kepada perusahaan angkutan penyeberangan yang melanggar ketentuan yang ada.

2.2.3. Sasaran Kegiatan 4 : Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi merupakan salah satu Unit Kerja di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang mempunyai peran strategis dalam melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan di bidang transportasi darat yang dirumuskan dalam Revisi Renstra BPTD Kelas II Jambi Tahun 2020-2024. Kegiatan pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan dan dilaksanakan memiliki daya saing dan nilai tambah serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Untuk mendukung kebijakan tersebut strategi yang dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi adalah dengan mewujudkan pelayanan transportasi darat yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas dan peningkatan angkutan perkotaan.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 4 diukur melalui 6 (enam) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1. IKK 3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal;
2. IKK 3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat;
3. IKK 3.3 Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS dan batas kecepatan;
4. IKK 3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan;
5. IKK 7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor;
6. IKK 7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP.

2.2.3.1. IKK 3.1 Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal

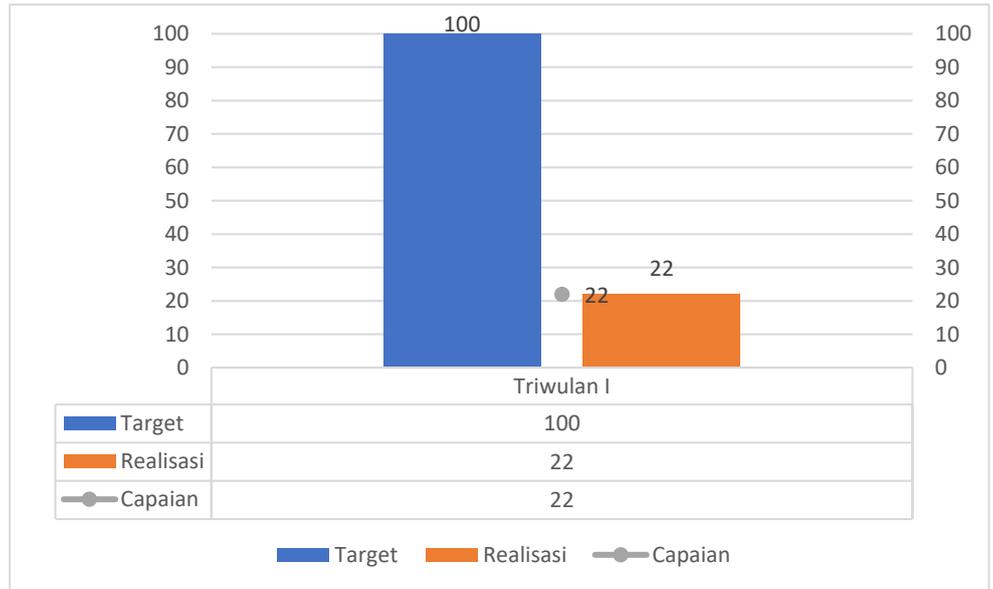
a.1) Definisi Indikator Kinerja

BPTD Kelas II Jambi memiliki tugas dan fungsi untuk menginventaris kebutuhan infrastruktur keselamatan jalan, membangun dan memfasilitasi infrastruktur keselamatan jalan, serta melakukan monitoring terhadap fasilitas jalan yang telah terpasang sesuai kondisi ideal. Pada indikator Kinerja kegiatan Persentase pelaksanaan jalan yang telah terpasang terdapat beberapa kegiatan yaitu :

1. Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan (Prioritas Nasional);
2. Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional);
3. Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK) (Prioritas Nasional);

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Capaian Kinerja Persentase pelaksanaan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal Tahun 2024 sebesar 22% jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebesar 100%, maka capaian kinerja mencapai 22%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK



Gambar II.6 Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024 IKK Persentase pelaksanaan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

a. Dasar Hukum

1. UU UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
3. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.7234/AJ.401/DRJD/2013 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Perlengkapan Jalan
4. Revisi Renstra BPTD Kelas II Jambi Tahun 2020 – 2024.

b. Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2024 target perjanjian kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelaksanaan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal memiliki target 100%.

c. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelaksanaan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal sebagai berikut :

1. Tersedianya anggaran;
2. Pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu;

3. Optimalnya pengawasan pembangunan.

d. Faktor-faktor Kegagalan :

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelaksanaan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal sebagai berikut :

- Tidak adanya anggaran;
- Pelaksanaan pembangunan tidak tepat waktu;
- Kurang optimalnya pelaksanaan pengawasan.

e. Perhitungan Realisasi Kinerja

Realisasi Kinerja Persentase pelaksanaan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan I sebesar 22%.

f. Perhitungan Capaian Kinerja

Realisasi Capaian Kinerja Indikator Persentase pelaksanaan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{22}{100} \times 100\% = 22\%$$

Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP sampai dengan Triwulan I mencapai 22%.

g. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Adapun pagu anggaran terkait Indikator Kinerja Persentase pelaksanaan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada Tahun 2024 yaitu:

1. Pagu anggaran kegiatan Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan (Prioritas Nasional) sebesar Rp. 17.238.124.000 realisasi sampai dengan Triwulan I sebesar Rp. 2.144.831.400;
2. Pagu anggaran kegiatan Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) sebesar Rp. 2.032.881.000 realisasi sampai dengan Triwulan I sebesar Rp. 318.00.000;
3. Pagu anggaran kegiatan Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK) (Prioritas Nasional) sebesar Rp. 3.090.809.000 realisasi sampai dengan Triwulan I sebesar 0;

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu dengan :

1. Melakukan pemeliharaan terhadap fasilitas perlengkapan jalan yang rusak;
2. Berkoordinasi dengan stakeholder terkait dalam upaya untuk bersama-sama menjaga fasilitas perlengkapan jalan yang sudah terpasang;
3. Berusaha melaksanakan pembangunan yang tepat waktu.

2.2.3.2. IKK 3.2 Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

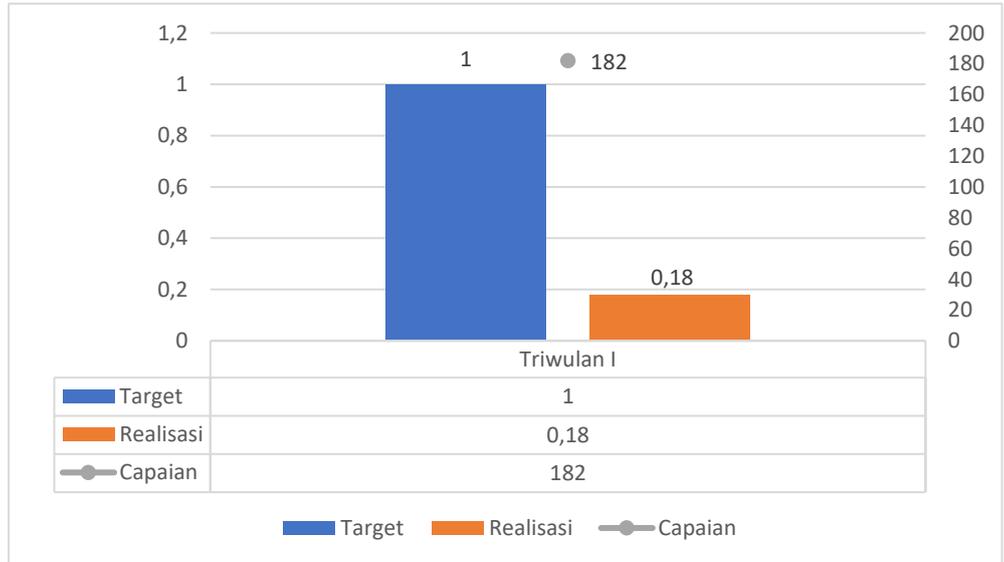
a.1) Definisi Indikator Kinerja

Pada IKK tersebut Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor disebut UPPKB adalah unit kerja di bawah Kementerian Perhubungan yang melaksanakan tugas pengawasan muatan barang dengan menggunakan alat penimbangan yang dipasang secara tetap pada setiap lokasi tertentu, dan juga meminimalisir pelanggaran Over Dimensi dan Over Load. BPTD Kelas II Jambi memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan muatan angkutan barang dan penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor dengan Fasilitas Penimbangan yang dilaksanakan oleh Satpel UPPKB untuk pencatatan, pengawasan, dan penindakan Angkutan Barang terhadap:

1. Tata cara pemuatan barang;
2. Dimensi kendaraan Angkutan Barang;
3. Tekanan seluruh sumbu dan/atau setiap sumbu kendaraan Angkutan Barang;
4. Dokumen Angkutan Barang;
5. Kelebihan muatan pada setiap kendaraan yang diperiksa; dan
6. Jenis barang yang diangkut, berat angkutan dan asal tujuan.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Capaian Kinerja Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2024 sebesar 0,18% jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebesar 1%, maka capaian kinerja mencapai 182%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik capaian IKK



Gambar II.7 Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024 IKK Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan;
2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
3. Revisi Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2020 – 2024.

b. Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2024 target perjanjian kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat memiliki target 1%.

c. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai berikut :

1. Patuhnya pemilik kendaraan barang terhadap aturan yang berlaku;
2. Para sopir dan armada angkutan mematuhi segala peraturan yang berlaku dan bersedia menerima sanksi atas pelanggaran yang terjadi;
3. Sarana dan prasarana yang memadai.

d. Faktor-faktor Kegagalan :

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai berikut :

1. Tidak patuhnya pemilik kendaraan barang terhadap aturan yang berlaku;
2. Kurangnya SDM;
3. Sarana dan prasarana yang tidak memadai.

e. Perhitungan Realisasi Kinerja

Realisasi Kinerja Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan I sebesar 17,82%.

f. Perhitungan Capaian Kinerja

Realisasi Capaian Kinerja Indikator Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{(target - (realisasi - target))}{target} \times 100\%$$

Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sampai dengan Triwulan I mencapai 15,82%.

g. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Adapun pagu anggaran terkait Indikator Kinerja Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 6.363.734.000 Adapun realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I sebesar Rp. 1.264.333.434.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu dengan :

1. Melakukan sosialisasi kepada para pengusaha/masyarakat terkait Over Dimensi Over Load (ODOL) kendaraan barang;
2. Memberikan sanksi tegas kepada sopir yang melanggar ketentuan Over Dimensi Over Load (ODOL);
3. Memperbaiki sarana dan prasarana yang masih kurang memadai.

2.2.3.3. IKK 3.3 Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS dan Batas Kecepatan

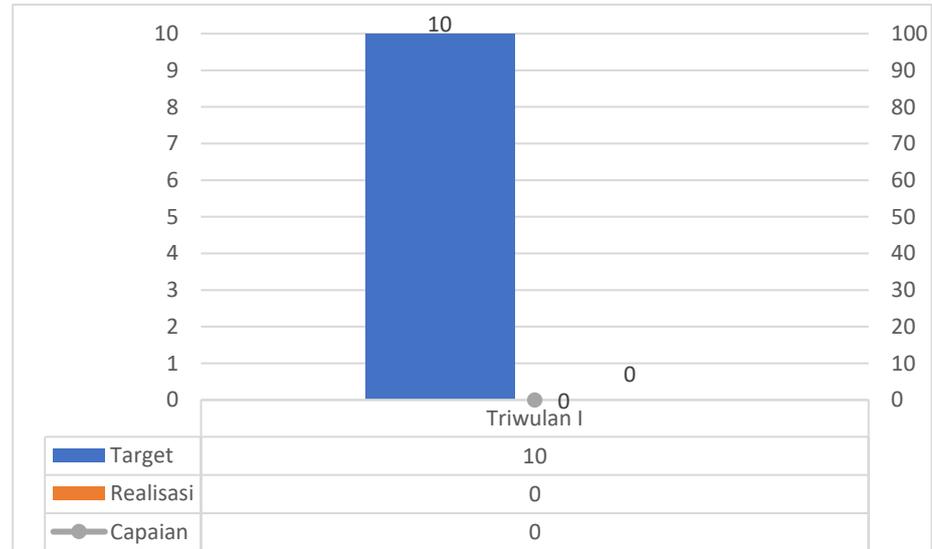
a.1) Definisi Indikator Kinerja

Zona Selamat Sekolah (ZoSS) adalah bagian dari kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa kegiatan pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki pada kawasan sekolah. Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) merupakan bagian dari kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa penyediaan sarana dan prasarana angkutan dengan pengendalian lalu lintas dan penggunaan jaringan jalan serta penggunaan sarana dan prasarana angkutan sungai dan danau dari pemukiman menuju sekolah.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Capaian Kinerja jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS dan Batas Kecepatan Tahun 2024 sebesar 0 lokasi, jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebesar 10 lokasi, maka capaian kinerja mencapai 0%. IKK tersebut belum terdapat realisasi dikarenakan anggaran pada IKK tersebut terkena Automatic Adjustment. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik capaian IKK

LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2024



Gambar II.8 Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024 IKK Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS dan Batas Kecepatan

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 16 Tahun 2016 tentang Penerapan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS);
3. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.3582/AJ.403/DRJD/2018 tentang Pedoman Teknis Pemberian Prioritas Keselamatan dan Kenyamanan Pejalan Kaki pada Kawasan Sekolah melalui Penyediaan Zona Selamat Sekolah;
4. Revisi Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2020 – 2024.

b. Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2024 target perjanjian kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS dan Batas Kecepatan memiliki target 10 lokasi.

c. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS dan Batas Kecepatan sebagai berikut :

1. Tersedianya anggaran untuk kegiatan tersebut;

2. Pembangunan tepat waktu;
3. Pembangunan yang tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat.

d. Faktor-faktor Kegagalan :

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS dan Batas Kecepatan sebagai berikut :

1. Anggaran terkena Automatic Adjustment;
2. Pembangunan tidak tepat waktu;
3. Pembangunan yang tidak tepat sasaran.

e. Perhitungan Realisasi Kinerja

Realisasi Kinerja Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS dan Batas Kecepatan pada Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan I sebesar 0 lokasi dikarenakan kegiatan tersebut terkena Automatic Adjustment.

f. Perhitungan Capaian Kinerja

Realisasi Capaian Kinerja Indikator Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS dan Batas Kecepatan pada Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{0}{100} \times 100\% = 0\%$$

Realisasi capaian indikator kegiatan Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS sampai dengan Triwulan I mencapai 0%.

g. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Adapun pagu anggaran terkait Indikator Kinerja Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 2.750.000.000 belum ada realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I dikarenakan kegiatan tersebut terkena Automatic Adjustment.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu dengan :

1. Melakukan pemasangan ZoSS untuk sekolah yang ada di tepi jalan akan menjadi pengingat bagi pengendara agar lebih waspada;
2. Mengalokasi anggaran untuk pemeliharaan area ZoSS;
3. Evaluasi Penerapan ZoSS.

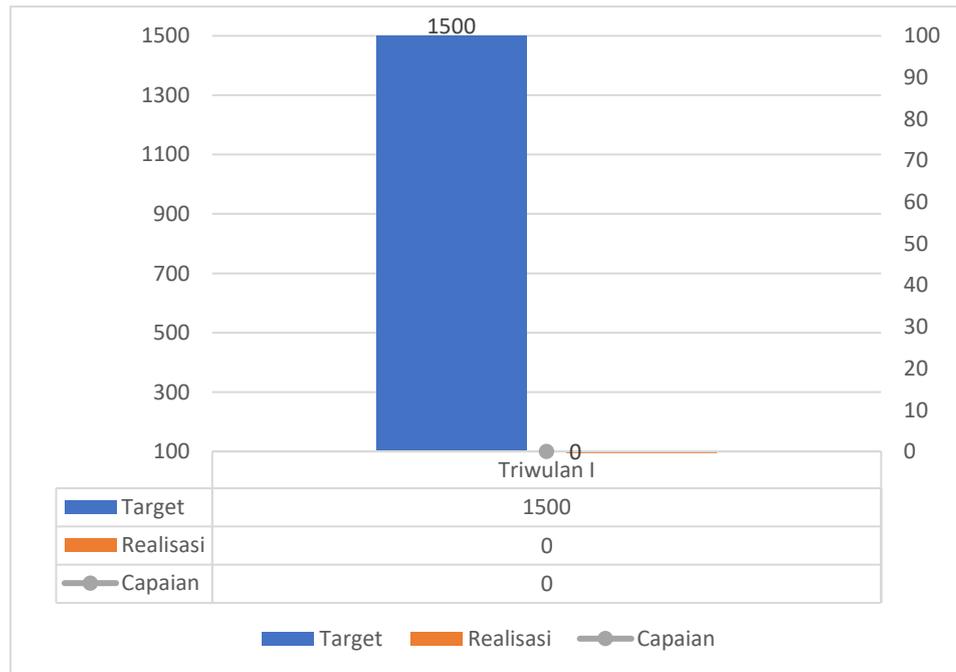
2.2.3.4 IKK 3.5 Jumlah Masyarakat yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan

a.1) Definisi Indikator Kinerja

Sosialisasi keselamatan transportasi jalan adalah kegiatan penyampaian informasi tentang keselamatan transportasi jalan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dalam bertransportasi. Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi adalah jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi keselamatan transportasi jalan melalui kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan yang diselenggarakan di Balai Pengelola Transportasi Darat. Jumlah masyarakat dihitung berdasarkan laporan pelaksanaan disetiap Balai Pengelola Transportasi Darat. Kegiatan pada IKK tersebut untuk mengkampanyekan keselamatan dalam berlalu lintas kepada masyarakat.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Capaian Kinerja Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan Tahun 2024 belum dilaksanakan dan rencana akan dilaksanakan pada bulan September jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebesar 1.500 orang maka capaian kinerja mencapai 0%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK



Gambar II.9 Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

a. Dasar Hukum

1. UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
3. Revisi Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2020 – 2024.

b. Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2024 target perjanjian kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan memiliki target 1.500 orang.

c. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan sosialisasi keselamatan kepada masyarakat secara kontinyu dan terus menerus;

2. Adanya koordinasi dan komitmen antara instansi pemerintah terkait dengan masyarakat terkait keselamatan lalu lintas;
3. Sumber Daya Manusia yang berkualitas.

d. Faktor-faktor Kegagalan :

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan sebagai berikut :

- Tidak adanya sosialisasi keselamatan;
- Tidak adanya koordinasi dan komitmen antara pemerintah instansi terkait dan masyarakat terkait keselamatan lalu lintas;
- Kurangnya SDM.

e. Perhitungan Realisasi Kinerja

Realisasi Kinerja Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan pada Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan I sebesar 0 orang dikarenakan kegiatan tersebut direncanakan akan dilaksanakan pada bulan September.

f. Perhitungan Capaian Kinerja

Realisasi Capaian Kinerja Indikator Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan pada Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{0}{1.500} \times 100\% = 0\%$$

Realisasi capaian indikator kegiatan Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan sampai dengan Triwulan I mencapai 0%.

g. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Adapun pagu anggaran terkait Indikator Kinerja Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 350.000.000 belum ada realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I dikarenakan kegiatan akan dilaksanakan pada bulan September.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu dengan :

1. Melakukan edukasi kesadaran tertib berlalu lintas;
2. Melakukan pemeliharaan terhadap ZoSS yang terpasang;
3. Melakukan koordinasi dan komitmen antara pemerintah instansi terkait dan masyarakat terkait keselamatan lalu lintas.

2.2.3.6 IKK 7a Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

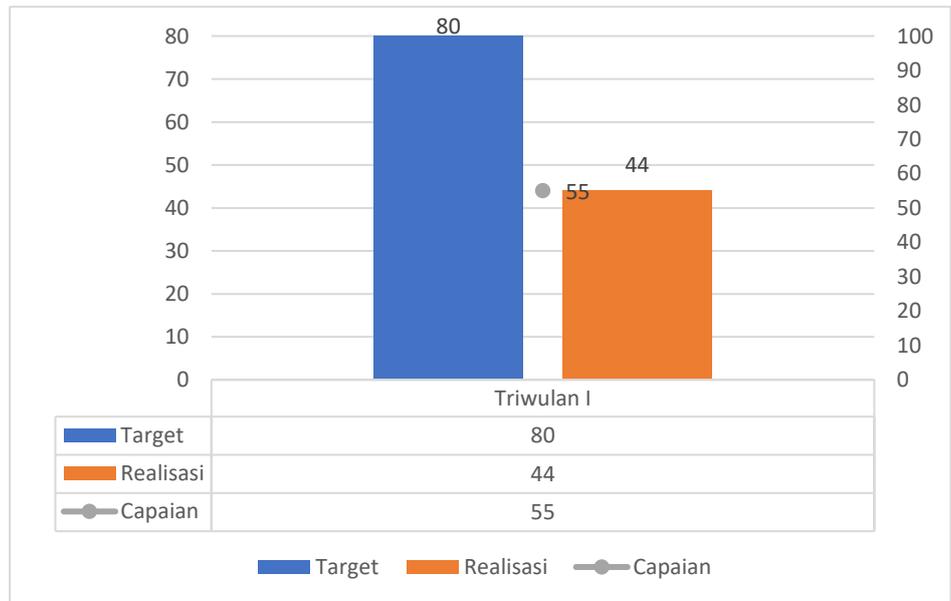
a.1) Definisi Indikator Kinerja

BPTD Kelas II Jambi memiliki tugas dan fungsi yang bertujuan melakukan pengawasan uji berkala untuk memastikan alat uji disetiap PKB laik fungsi berjalan sesuai SOP pada seluruh kab/kota yang ada di Provinsi Jambi.

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/ atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana yang telah dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan bahwa Unit pelaksana Uji Berkala wajib melaksanakan pengujian setelah memperoleh akreditasi dan sertifikasi, menggunakan peralatan pengujian yang terkalibrasi dan dilengkapi dengan sistem informasi manajemen pengujian Kendaraan Bermotor yang terintegrasi dengan hasil uji berupa Bukti Lulus Uji Berkala Elektronik (BLU-E). Standarisasi pengujian kendaraan dalam hal ini sebagai pemenuhan standar Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) Dinas Perhubungan Kabupaten/ Kota dengan penetapan Akreditasi UPUBKB sebagai bermotor adalah aspek pemenuhan pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pengujian kendaraan bermotor yang ditetapkan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Capaian Kinerja Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor Tahun 2024 sebesar 44%, jika dibandingkan dengan target PK Tahun 2024 sebesar 80%, maka capaian kinerja mencapai 55%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK



Gambar II.10 Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
3. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK. 1471/aj.402/drjd/2017 Tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
4. Revisi Renstra BPTD Kelas II Jambi Tahun 2020 – 2024.

b. Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2024 Indikator Kinerja Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor terhadap Keselamatan transportasi darat memiliki target 80%.

c. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor sebagai berikut :

1. Permintaan dari Dishub Kab/ Kota;
2. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai;
3. Tersedianya SDM yang terampil dan memiliki kompetensi.

d. Faktor-faktor Kegagalan :

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor sebagai berikut :

- Tidak adanya anggaran;
- Sarana dan prasarana yang tidak memadai;
- Kurangnya SDM.

e. Perhitungan Realisasi Kinerja

Realisasi Kinerja Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor pada Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan I sebesar 44%.

f. Perhitungan Capaian Kinerja

Realisasi Capaian Kinerja Indikator Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor pada Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{44}{80} \times 100\% = 55\%$$

Realisasi capaian indikator kegiatan Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor sampai dengan Triwulan I mencapai 55%.

g. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Penganggaran Indikator Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor berdasarkan Nomenklatur di POK yaitu sebesar Rp. 235.000.000,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 34.995.268,-.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu dengan :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor;
2. Meningkatkan SDM penguji kendaraan bermotor;
3. Memperbaiki sarana dan prasarana yang belum memadai.

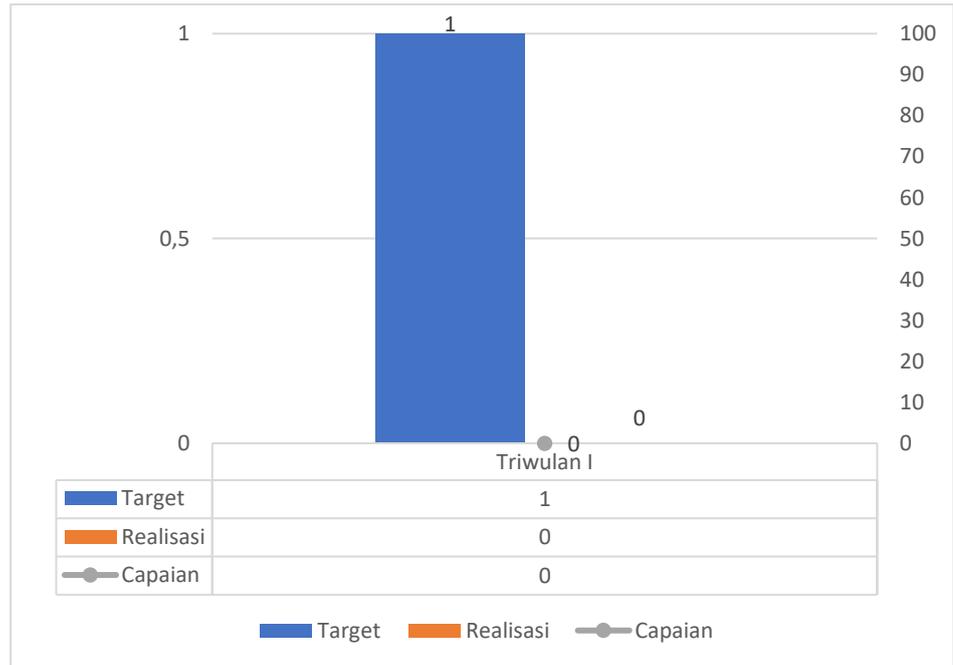
2.2.3.7 IKK 7b Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP

a.1) Definisi Indikator Kinerja

BPTD Kelas II Jambi memiliki tugas dan fungsi yang bertujuan untuk menginventaris kebutuhan fasilitas keselamatan di SDP dan membangun dan memfasilitasi infrastruktur keselamatan di SDP serta melakukan monitoring terhadap fasilitas SDP yang telah terpasang.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Capaian Kinerja Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP Tahun 2024 sebesar 0 Lokasi, jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebesar 1 lokasi maka capaian kinerja mencapai 0%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK



Gambar II.11 Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 52 Tahun 2012 tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau;
3. Revisi Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2020 – 2024.

b. Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2024 Indikator Kinerja Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP memiliki target 1 lokasi.

c. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP sebagai berikut :

1. Kondisi dilapangan yang mendukung, seperti cuaca
2. Kontrak pekerjaan tepat waktu
3. Kesesuaian dengan kebutuhan

d. Faktor-faktor Kegagalan :

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP sebagai berikut :

1. Tidak adanya anggaran;
2. Pekerjaan tidak selesai dengan waktu yang telah ditentukan;
3. Perkiraan Tidak sesuai dengan kebutuhan.

e. Perhitungan Realisasi Kinerja

Realisasi Kinerja Kegiatan Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP pada Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan I sebesar 0 lokasi.

f. Perhitungan Capaian Kinerja

Realisasi Capaian Kinerja Indikator Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP pada Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$$

Realisasi capaian indikator kegiatan ersentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor sampai dengan Triwulan I mencapai 0%.

g. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Pagu Anggaran Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP berdasarkan Nomenklatur di POK yaitu sebesar Rp. 1.800.000.000,-. Adapun realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I sebesar Rp. 0,-.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu dengan :

1. Mewujudkan ketertiban dalam pelaksanaan pengadaan dan pemasangan fasilitas perlengkapan SDP;
2. Mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalulintas dan angkutan SDP serta memberikan kemudahan bagi pengguna SDP dalam berlalu lintas;

3. Mewujudkan perairan yang berkeselamatan;
4. Menginventarisasi kembali jumlah rambu sungai yang akan dipasang;
5. Memasang rambu sungai di daerah yang belum terpasang.

2.2.4. Sasaran Kegiatan 5 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

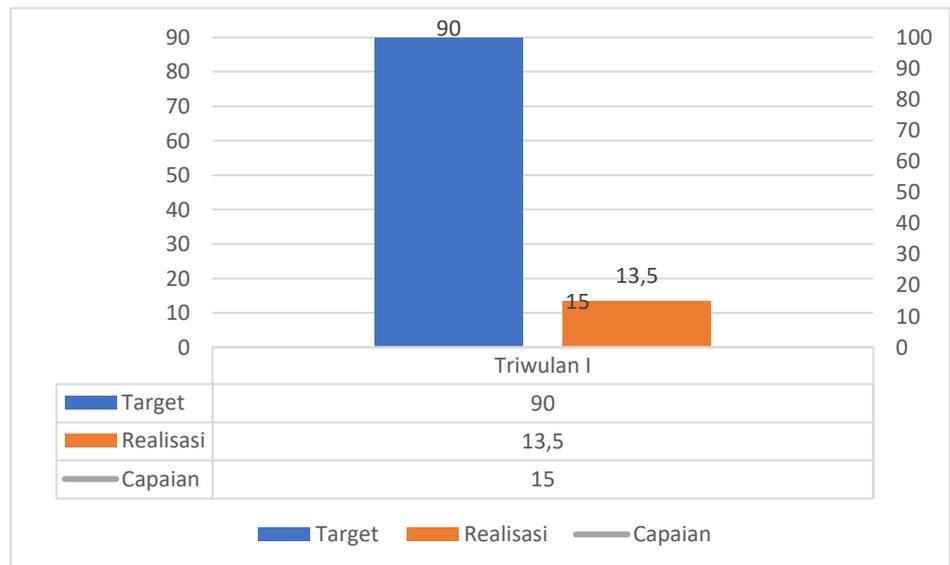
2.2.4.1. IKK 5.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

a.1) Definisi Indikator Kinerja

Capaian kinerja pada indikator Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat ini terdapat beberapa kegiatan dengan capaian kinerja sebesar 13,5%.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Capaian Kinerja Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Tahun 2024 sebesar 13,5%, jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebesar 90%, maka capaian kinerja mencapai 15%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK



Gambar II.12 Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
2. Revisi Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2020 – 2024.

b. Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2024 Indikator Kinerja Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat memiliki target Nilai sebesar 90.

c. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat sebagai berikut :

1. SDM yang cukup dan berkualitas;
2. Sarana dan prasarana yang memadai;
3. Tersedianya anggaran.

d. Faktor-faktor Kegagalan :

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat sebagai berikut :

1. Tidak adanya anggaran;
2. Sarana dan prasarana yang tidak memadai;
3. Kurangnya SDM.

e. Perhitungan Realisasi Kinerja

Realisasi Kinerja Kegiatan Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat pada Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan I sebesar 13,5.

f. Perhitungan Capaian Kinerja

Realisasi Capaian Kinerja Indikator Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat pada Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{13,5}{90} \times 100\% = 15\%$$

Realisasi capaian indikator Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat sampai dengan Triwulan I mencapai 15%.

g. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Pagu Anggaran Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat berdasarkan Nomenklatur di POK yaitu sebesar Rp. 4.143.720.000,-. Adapun realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I sebesar Rp. 265.530.978,-.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu :

1. Melaksanakan tugas dan fungsi BPTD Kelas II Jambi secara optimal;
2. Memperbaiki sarana dan prasarana yang belum memadai
3. Membentuk SDM yang berkualitas.

2.2.5. Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatkan Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat dan Akuntabel

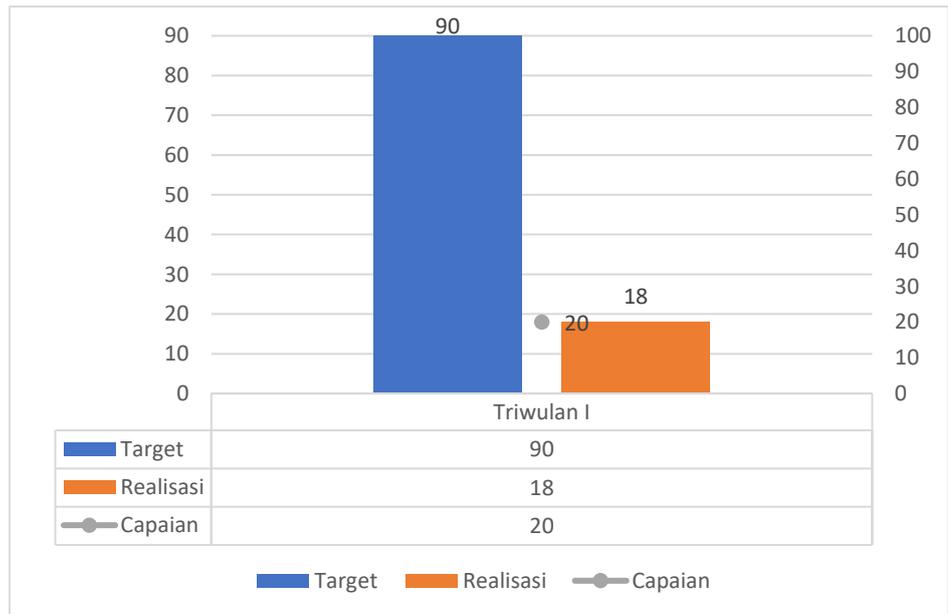
2.2.5.1. IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

a.1) Definisi Indikator Kinerja

Capaian kinerja pada indikator Tingkat penyelenggaraan perkantoran ditjen perhubungan darat ini terdapat beberapa kegiatan dengan capaian kinerja sebesar 20%.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Capaian Kinerja Tingkat penyelenggaraan perkantoran ditjen perhubungan darat Tahun 2024 sampai dengan Triwulan I sebesar 18, jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebesar 90, maka capaian kinerja mencapai 20. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK



Gambar II.13 Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Tingkat penyelenggaraan perkantoran ditjen perhubungan darat

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
2. Revisi Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2020 – 2024.

b. Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2024 Indikator Kinerja Tingkat penyelenggaraan perkantoran ditjen perhubungan darat memiliki target Nilai sebesar 90.

c. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Tingkat penyelenggaraan perkantoran ditjen perhubungan darat sebagai berikut :

1. SDM yang cukup dan berkualitas;
2. Sarana dan prasarana yang memadai;
3. Tersedianya anggaran

d. Faktor-faktor Kegagalan :

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat penyelenggaraan perkantoran ditjen perhubungan darat sebagai berikut :

1. Tidak adanya anggaran;
2. Sarana dan prasarana yang tidak memadai;
3. Kurangnya SDM.

e. Perhitungan Realisasi Kinerja

Realisasi Kinerja Kegiatan Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat pada Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan I sebesar 13,5.

f. Perhitungan Capaian Kinerja

Realisasi Capaian Kinerja Indikator Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat pada Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{18}{90} \times 100\% = 20\%$$

Realisasi capaian indikator Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat sampai dengan Triwulan I mencapai 20%.

g. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Pagu Anggaran Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat berdasarkan Nomenklatur di POK yaitu sebesar Rp. 24.118.410.000,-. Adapun realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I sebesar Rp.8.886.598.402,-.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu :

1. Meningkatkan layanan penyelenggaraan perkantoran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi.
2. Memperbaiki sarana dan prasarana yang belum memadai
3. Membentuk SDM yang berkualitas.

II.3. Realisasi Anggaran

II.3.1. Alokasi Anggaran Tahun 2024

1. Pagu Anggaran

a. Rincian Per Sumber Dana Tahun 2024 Per Triwulan I

Pagu Per Triwulan I DIPA TA. 2024 sebesar Rp. 88.970.577.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.2 Rincian per Sumber Dana pagu Tahun 2024 per Triwulan I

Sumber Dana	Pagu (Rp)
RM	87.170.577.000
PNBP	1.800.000.000
SBSN	-
Total	88.970.577.000

b. Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2023 Per Triwulan I

Tabel II.3 Rincian per Jenis Belanja Pagu Tahun 2024 per Triwulan I

Jenis Belanja	Pagu (Rp)
Belanja Pegawai	17.633.587.000
Belanja Barang	52.881.081.000
Belanja Modal	18.455.909.000
Total	88.970.577.000

c. Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran

Berikut uraian surat pengesahan revisi anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 :

1. Pagu Anggaran awal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-

LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2024

022.03.2.403845/2024 tanggal 24 November 2023 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 88.970.577.000.

2. Revisi Ke-1 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403845/2024 tanggal 17 Januari 2024 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 88.970.577.000.
3. Revisi Ke-2 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403845/2024 tanggal 31 Januari 2024 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 88.970.577.000.
4. Revisi Ke-3 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403845/2024 tanggal 19 Februari 2024 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 88.970.577.000.
5. Revisi Ke-4 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403845/2024 tanggal 14 Maret 2024 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 88.970.577.000.

2. Refocusing Anggaran Tahun 2024

a. Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2024 per Triwulan I

Tabel II.4 Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2024 per Triwulan I

Pagu	Sumber Dana (Rp)			Jumlah (Rp)
	RM	PNBP	SBSN	
Pagu Awal	87.170.577.000	1.800.000.000	-	88.970.577.000
Revisi Ke-1	87.170.577.000	1.800.000.000	-	88.970.577.000
Revisi Ke-2	87.170.577.000	1.800.000.000	-	88.970.577.000
Revisi Ke-3	87.170.577.000	1.800.000.000	-	88.970.577.000
Revisi Ke-4	87.170.577.000	1.800.000.000	-	88.970.577.000

b. Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun 2024 per Triwulan I**Tabel II.5** Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun 2024 per Triwulan I

Pagu	Jenis Belanja (Rp)			Jumlah (Rp)
	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	
Pagu Awal	17.633.587.000	52.881.081.000	18.455.909.000	88.970.577.000
Revisi Ke-1	17.633.587.000	52.881.081.000	18.455.909.000	88.970.577.000
Revisi Ke-2	17.633.587.000	52.881.081.000	18.455.909.000	88.970.577.000
Revisi Ke-3	17.633.587.000	52.881.081.000	18.455.909.000	88.970.577.000
Revisi Ke-4	17.633.587.000	52.881.081.000	18.455.909.000	88.970.577.000

c. Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2024 per Triwulan I**Tabel II.6** Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2024 per Triwulan I

Sumber Dana dan Jenis Belanja	Pagu awal	Perubahan	Pagu Per Triwulan I
Belanja Pegawai	17.633.587.000	-	17.633.587.000
RM	17.633.587.000	-	17.633.587.000
PNBP	-	-	-
SBSN	-	-	-
Belanja Barang	52.881.081.000	-	52.881.081.000
RM	52.581.081.000	-	52.581.081.000
PNBP	300.000.000	-	300.000.000
SBSN	-	-	-
Belanja Modal	18.455.909.000	-	18.455.909.000
RM	16.955.909.000	-	16.955.909.000
PNBP	1.500.000.000	-	1.500.000.000
SBSN	-	-	-

d. Rincian Realokasi Per Sasaran Program dan Per Kegiatan Tahun 2024 per Triwulan I

Tabel II.7 Rincian Realokasi Per Sasaran Program dan Per Kegiatan Tahun 2024 per Triwulan I

KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL	PERUBAHAN	PAGU PER TRIWULAN I
GA	Program Infrastruktur Konektivitas	64.852.167.000	-	64.852.167.000
GA.4637	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	17.500.000.000	-	17.500.000.000
GA.4638	Pelayanan Transportasi Darat	9.582.899.000	-	9.582.899.000
GA.4639	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	33.625.548.000	-	33.625.548.000
GA.4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	4.143.720.000	-	4.143.720.000
WA	Program Dukungan Manajemen	24.118.410.000	-	24.118.410.000
WA.4596	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	262.000.000	-	262.000.000
WA.4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	6.222.823.000	-	6.222.823.000
WA.4671	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	17.633.587.000	-	17.633.587.000

3. Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2020-2024

Berikut adalah rincian perbandingan pagu dan realisasi Tahun anggaran 2020-2024 sampai dengan Triwulan I:

Tabel II.8 Rincian perbandingan pagu dan realisasi Tahun anggaran 2020-2024 sampai dengan Triwulan I

No	Tahun	Pagu Awal (Rp)	Pagu per Triwulan I (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2020	88.949.535.000	88.649.535.000	12.491.200.597	14,09
2	2021	129.371.473.000	98.526.002.000	10.833.725.243	11,00
3	2022	65.786.704.000	61.406.971.000	10.050.537.080	16,37
4	2023	101.360.757.000	101.360.757.000	14.403.929.167	14,21
5	2024	88.970.577.000	88.970.577.000	13.079.056.704	14,70

II.3.2. Realisasi Anggaran Anggaran Tahun 2024

1. Realisasi Anggaran per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2024

Berikut adalah rincian realisasi Anggaran per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2024 sampai dengan Triwulan I:

Tabel II.9 Rincian perbandingan pagu dan realisasi Tahun anggaran 2020-2024 sampai dengan Triwulan I

KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL (Rp)	PAGU PER TRIWULAN I (Rp)	REALISASI PAGU PER TRIWULAN I (Rp)	%
GA	Program Infrastruktur Konektivitas	64.852.167.000	64.852.167.000	8.028.117.242	12,38
GA.4637	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	17.500.000.000	17.500.000.000	1.200.934.500	6,86
GA.4638	Pelayanan Transportasi Darat	9.582.899.000	9.582.899.000	1.989.914.141	20,77
GA.4639	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	33.625.548.000	33.625.548.000	4.083.831.834	12,15

LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2024

KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL (Rp)	PAGU PER TRIWULAN I (Rp)	REALISASI PAGU PER TRIWULAN I (Rp)	%
GA.4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	4.143.720.000	4.143.720.000	753.436.767	18,18
WA	Program Dukungan Manajemen	24.118.410.000	24.118.410.000	8.893.239.190	36,87
WA.4596	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	262.000.000	262.000.000	0	0%
WA.4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	6.222.823.000	6.222.823.000	1.791.662.189	28,79
WA.4671	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	17.633.587.000	17.633.587.000	7.101.577.001	40,27

2. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2024

Berikut adalah rincian realisasi Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan I:

Tabel II.10 Rincian realisasi Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan I

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi Pagu (Rp)	%
Belanja Pegawai	17.633.587.000	7.101.577.001	40,27
Belanja Barang	52.881.081.000	8.204.984.031	15,52
Belanja Modal	18.455.909.000	1.614.795.400	8,75
Total	88.970.577.000	16.921.356.432	19,02

3. Realisasi Anggaran per Sumber Dana Tahun 2024

Berikut adalah rincian realisasi Anggaran per Sumber Dana Tahun 2024 sampai dengan Triwulan I:

Tabel II.11 Rincian realisasi Anggaran Sumber Dana Tahun 2024 sampai dengan Triwulan I

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi Pagu	%
RM	87.170.577.000	16.921.356.432	19,41
PNBP	1.800.000.000	0	-
SBSN	0	0	-
Total	88.970.577.000	16.921.356.432	19,02

4. Analisis Dana Yang Tidak Terserap oleh Unit Kerja

Untuk analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya Keuangan untuk Triwulan I TA. 2024 terkait dana yang belum terserap dikarenakan kegiatan belum berjalan dan saat ini sedang persiapan proses pelaksanaan kegiatan.

II.3.3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Analisis atas Efisiensi penggunaan sumber daya keuangan

Tabel II.12 Rincian penggunaan sumber daya keuangan Tahun 2024 sampai dengan Triwulan I

REALISASI KEUANGAN per Triwulan I	
Pagu Anggaran (Rp)	88.970.577.000
Realisasi E-MON (Rp)	15.973.407.816
Realisasi SPAN (Rp)	13.079.056.704

2. Hambatan dan Kendala

Beberapa hambatan dan kendala masih rendahnya daya serap anggaran antara lain:

- a. Sistem perencanaan yang masih kurang matang mengenai pemahaman kebutuhan anggaran;
- b. Pada kegiatan kontraktual sampai dengan Triwulan I masih banyak kegiatan yang belum berkontrak.



PENDAHULUAN

AKUNTABILITAS
KINERJA

PENUTUP

LAMPIRAN

BAB I

BAB II

BAB III

BAB III**PENUTUP****III.1. Ringkasan Capaian**

Dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi serta Pengelolaan Sumber Daya dan Pelaksanaan Kebijakan dan Program. Laporan Monitoring Capaian Kinerja ini perlu disusun secara berkala sebagai salah satu alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Sebagai penutup dari Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagai kelanjutan dari pelaksanaan kegiatan untuk Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dari keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 ini terdapat 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Triwulan I Tahun 2024. Adapun rincian capaian untuk setiap IKK pada Triwulan I Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
 - 1) Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan jalan terealisasi sebesar 23,85% (target 100%);
 - 2) Jumlah terminal tipe a dan terminal barang yang beroperasi terealisasi sebesar 4 lokasi (target 4 lokasi);
 - 3) Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi terealisasi 4 lokasi (target 4 lokasi);
 - 4) Persentase pelaksanaan SPM di Terminal Tipe A terealisasi 87% (target 95%);
 - 5) Persentase pelaksanaan SPM di Pelabuhan SDP terealisasi 80% (target 100%);
 - 6) Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal terealisasi 22% (target 100%);
 - 7) Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat terealisasi 0,18% (target 1%);
 - 8) Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS dan batas kecepatan terealisasi 0 lokasi (target 10 lokasi);
 - 9) Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan terealisasi 0 orang (target 1.500 orang);
 - 10) Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor terealisasi 44% (target 80%);
 - 11) Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran terealisasi 0 Lokasi (target 1 Lokasi)

- 12) Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat tercapai 13,5 (target 90);
 - 13) Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat tercapai 18 (target 90).
2. Untuk meningkatkan capaian kinerja di selanjutnya, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi akan melakukan monitoring dan pemantauan terhadap kegiatan di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi.
 3. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi juga akan meningkatkan koordinasi dengan melakukan monitoring keselamatan dan keamanan transportasi darat dan penyeberangan agar dapat lebih meningkatkan kinerja menuju *Zero Accident*.

III.2. Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

Adapun hasil evaluasi, rekomendasi dan unit kerja penanggung jawab dijabarkan sebagai berikut:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target dalam PK	Triwulan I			Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	
					Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja				
1.	SK 1. Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	100	23,85	23,85	Belum Tercapai	Menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan umum perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut.	- Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan - Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	4	4	4	100	Tercapai	1. Melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP terkait tugas dan tanggung jawab seluruh staf Terminal Tipe A; 2. Melakukan evaluasi pelaksanaan terkait manajemen SDM; 3. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait tugas dan tanggung jawab serta komitmen untuk pelaksanaan operasional di Terminal Tipe A.	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan

LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target dalam PK	Triwulan I			Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
					Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja			
		IKK 1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4	4	4	100	Tercapai	Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait tugas dan tanggung jawab serta komitmen untuk pelaksanaan operasional di Pelabuhan Penyeberangan.	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
2.	SK 2. Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK 2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	95	95	82,6	87	Belum Tercapai	Melaksanakan monitoring terhadap SPM di Terminal tipe-A	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		IKK 2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	100	100	80,3	80,3	Belum Tercapai	Melaksanakan monitoring terhadap SPM di Pelabuhan SDP	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
3.	SK 4. Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK 3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	100	22	22	Belum Tercapai	1. Menginventaris kebutuhan infrastruktur keselamatan jalan; 2. Membangun dan memfasilitasi infrastruktur keselamatan jalan; 3. Melakukan monitoring terhadap fasilitas jalan yang telah terpasang.	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan
		IKK 3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	1	1	0,18	182	Tercapai	1. Menyiapkan infrastruktur UPPKB yang memadai; 2. Menyiapkan SDM yang berkompeten	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan

LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target dalam PK	Triwulan I			Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	
					Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja				
		IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1500	1500	0	0	Tercapai	Kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan telah dilaksanakan	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	80	80	44	55	Belum Tercapai	1. Melaksanakan kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Perusahaan Karoseri; 2. Melaksanakan Kalibrasi Alat Uji UPUBKB; 3. Pengadaan Alat Kalibrasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor.	Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan
		IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Lokasi	1	1	0	0	Belum Tercapai	1. Menginventaris kebutuhan fasilitas keselamatan di SDP; 2. Membangun dan memfasilitasi infrastruktur keselamatan di SDP; 3. Melakukan monitoring terhadap fasilitas SDP yang telah terpasang.	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan
4.	SK 5. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	90	13,85	15	Belum Tercapai	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan	Subbag Tata Usaha
5.	SK 1. Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90	90	18	20	Tercapai	Melaksanakan layanan perkantoran dan Layanan Dukungan Manajemen Internal	Subbag Tata Usaha



PENDAHULUAN

AKUNTABILITAS
KINERJA

PENUTUP

LAMPIRAN

BAB I

BAB II

BAB III



**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2024
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II JAMBI**

JAMBI, 3 JANUARI 2024

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II JAMBI**

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAMBI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	4
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4
2	SK2 Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	95
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	100
3	SK4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	1
		IKK3.3 Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS dan batas kecepatan	Lokasi	10
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1500
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	80
		IKK7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Lokasi	1
4	SK5 Meningkatnya kualitas	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat			
5	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1 Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

Jambi, 3 Januari 2024

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Jambi

EKO INDRA YANTO
NIP. 19790220 200112 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eko Indra Yanto

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Drs. Hendro Sugiatno, M.M.

Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.

Jambi, 3 Januari 2024
Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Jambi

EKO INDRA YANTO
NIP. 19790220 200112 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAMBI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	4
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4
2	SK2 Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	95
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	100
3	SK4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	1
		IKK3.3 Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS dan batas kecepatan	Lokasi	10
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1500
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	80
		IKK7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Lokasi	1
4	SK5 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
5	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1 Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

KEGIATAN**ANGGARAN**

1.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 17.500.000.000
2.	Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 9.582.899.000
3.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 33.625.548.000
4.	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 4.143.720.000
5.	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	Rp. 262.000.000
6.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp. 6.222.823.000
7.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp. 17.633.587.000

Disetujui
Direktur Jenderal Perhubungan Darat



Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.

Jambi, 3 Januari 2024
Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Jambi



EKO INDRA YANTO
NIP. 19790220 200112 1 001

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAMBI
TAHUN 2024**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Pelaksana / Penanggung Jawab	
						B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12			
SK 1.	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	1. Subsidi operasional angkutan jalan	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	5.000.000.000	- Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan - Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	4	1. Operasional Terminal Penumpang Tipe A : - Terminal Alam Barajo - Terminal Sribulan Sarolangun - Terminal Bangko Merangin - Terminal Bungo	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8.233.829.000	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4	1. Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan : - Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal - Pelabuhan Sungai Ps. Angso Duo - Pelabuhan Sungai Nipah Panjang - Pelabuhan Sungai Mendahara	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1.349.070.000	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
SK 2.	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	95	1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	7,9167	7,9167	7,9167	7,9167	7,9167	7,9167	7,9167	7,9167	7,9167	7,9167	7,9167	7,9167	1.354.000.000	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	100	1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	1.354.000.000	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
SK 4.	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	1. Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	2.032.881.000	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan
						2. Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK)													3.090.809.000	
3. Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional)	22.361.814.000																			
		IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Dijen Perhubungan Darat	%	1	1. Operasional UPPKB -UPPKB Jambi Merlung -UPPKB Muara Tembesi -UPPKB Sarolangun -UPPKB Sungai Penuh	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6.363.734.000	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan	

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Pelaksana / Penanggung Jawab
						B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12		
		IKK3.3 Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS dan batas kecepatan	Lokasi	10	- Kota Jambi: - Kab. Batanghari - Kab. Merangin - Kab. Bungo - Kab. Tanjab Barat	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	-	-	2.750.000.000	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1500	1. Kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	350.000.000	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	80	1. Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Perusahaan Karoseri 2. Pelaksanaan Kalibrasi Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor	6,6667	6,6667	6,6667	6,6667	6,6667	6,6667	6,6667	6,6667	6,6667	6,6667	6,6667	6,6667	235.000.000	Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan
		IKK7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Lokasi	1	1. Pengadaan dan pemasangan rambu sungai di sungai Batanghari (100 Unit) termasuk supervisi 2. Pemeliharaan Rambu Sungai dan Danau	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.800.000.000	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan
SK 5.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	1. Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	4.143.720.000	Subbag Tata Usaha
SK 1.	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1 Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90	1. Program Dukungan Manajemen	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	24.118.410.000	Subbag Tata Usaha

Jambi, 5 Januari 2024
Kepala Balai



Eko Indra Yanto
NIP. 19790220 200112 1 001

**MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAMBI
BULAN JANUARI TAHUN 2024**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-1				Realisasi Bulan-1		Capaian Bulan-1		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Pelaksana / Penanggung Jawab	
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran				
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	Volume	Volume				
SK 1.	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	1. Subsidi operasional angkutan jalan	Jumlah Lintas Angkutan Jalan Perintis	Layanan Angkutan Jalan Perintis	8.3333	100	5.000.000.000	100	4,05	478.813.800	49%	10%	Tidak Tercapai	Menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan umum perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut.	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan - Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	4	1. Operasional Terminal Penumpang Tipe A : - Terminal Alam Barajo - Terminal Sribulan Sarolangun - Terminal Bangko Merangin - Terminal Bungo	Jumlah Terminal Penumpang Tipe-A dikelola	Pelayanan Transportasi Darat	4	100	8.233.829.000	100	4	0	100%	0%	Tercapai	1. Melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP terkait tugas dan tanggung jawab seluruh staf Terminal Tipe A; 2. Melakukan evaluasi pelaksanaan terkait manajemen SDM; 3. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait tugas dan tanggung jawab serta komitmen untuk pelaksanaan operasional di Terminal Tipe A.	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4	1. Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan : - Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal - Pelabuhan Sungai Ps. Angso Duo - Pelabuhan Sungai Nipah Panjang - Pelabuhan Sungai Mendahara	Jumlah Pelabuhan SDP	Pengawasan Operasional Pelabuhan SDP	4	100	1.349.070.000	100	4	0	100%	0%	Tercapai	Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait tugas dan tanggung jawab serta komitmen untuk pelaksanaan operasional di Pelabuhan Penyeberangan.	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
SK 2.	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	95	1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	Monitoring Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	95	100	1.354.000.000	100	0	0	0%	0%	Belum Tercapai	Melaksanakan monitoring terhadap SPM di Terminal tipe-A	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	100	1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	Monitoring Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	100	100	1.354.000.000	100	0	0	0%	0%	Belum Tercapai	Melaksanakan monitoring terhadap SPM di Pelabuhan SDP	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
SK 4.	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	1. Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan 2. Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK) 3. Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional)	Melaksanakan kegiatan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan	Terlaksananya kegiatan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan	2.032.881.000	100	0	0	0%	0%	Belum Tercapai	1. Menginventaris kebutuhan infrastruktur keselamatan jalan; 2. Membangun dan memfasilitasi infrastruktur keselamatan jalan; 3. Melakukan monitoring terhadap fasilitas jalan yang telah terpasang.	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan		
									3.090.809.000	100	0	0%							
									17.238.124.000	100	0	0%							
		IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Dijen Perhubungan Darat	%	1	1. Operasional UPPKB -UPPKB Jambi Merlung -UPPKB Muara Tembesi -UPPKB Sarolangun -UPPKB Sungai Penuh	Jumlah kendaraan barang yang ditimbang / diperiksa	Menurunnya jumlah kendaraan barang yang melanggar	1	100	6.363.734.000	100	0	0	0%	0%	Belum Tercapai	1. Menyiapkan infrastruktur UPPKB yang memadai; 2. Menyiapkan SDM yang berkompeten	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan
IKK3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS dan batas kecepatan	Lokasi	10	Pembangunan ZoSS di Provinsi Jambi: - Kota Jambi: - Kab. Batanghari - Kab. Merangin - Kab. Bungo - Kab. Tanjab Barat	Melaksanakan Pembangunan ZoSS	Tertaksananya Pembangunan ZoSS	10	100	2.750.000.000	100	0	0	0%	0%	Belum Tercapai	Kegiatan tersebut terkena Automatic Adjustment	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan		

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-1				Realisasi Bulan-1		Capaian Bulan-1		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Pelaksana / Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	Volume	Volume			
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1500	1. Kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan	Melaksanakan Kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan	Terlaksananya Kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan	1500	100	350.000.000	100	0	0	0%	0%	Belum Tercapai	Pelaksanaan kegiatan diperkirakan terlaksana bulan Oktober Tahun 2024	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	80	1. Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Perusahaan Karoseri	Melaksanakan kegiatan fisik rancang bangun pada perusahaan karoseri dan kegiatan pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian kendaraan bermotor	Terlaksananya kegiatan fisik rancang bangun pada perusahaan karoseri dan kegiatan pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian kendaraan bermotor	80	100	235.000.000	100	0	0	0%	0%	Belum Tercapai	1. Melaksanakan kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Perusahaan Karoseri; 2. Melaksanakan Kalibrasi Alat Uji UPUBKB.	Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan
		IKK7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran air pelayaran SDP	Lokasi	1	1. Pengadaan dan pemasangan rambu sungai di sungai Batanghari (100 Unit) termasuk supervisi	Melaksanakan pengadaan dan Pemeliharaan Rambu Sungai	Terlaksananya pengadaan dan Pemeliharaan Rambu Sungai	1	100	1.800.000.000	100	0	0	0%	0%	Belum Tercapai	1. Menginventaris kebutuhan fasilitas keselamatan di SDP; 2. Membangun dan memfasilitasi infrastruktur keselamatan di SDP; 3. Melakukan monitoring terhadap fasilitas SDP yang telah terpasang.	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan
SK 5.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	1. Tupoksi Dijen Perhubungan Darat	Melaksanakan Tupoksi Dijen Perhubungan Darat	Terlaksananya Tupoksi Dijen Perhubungan Darat	90	100	4.143.720.000	100	0	0	0%	0%	Belum Tercapai	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan	Subbag Tata Usaha
SK 1.	Meningkatnya Birokrasi Dijen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1 Tingkat penyelenggaraan perkantoran Dijen Perhubungan Darat	Nilai	90	1. Program Dukungan Manajemen	Melaksanakan Program Dukungan dan Manajemen	Terlaksananya Program Dukungan dan Manajemen	90	100	24.118.410.000	100	11,5	2.774.441.358	13%	12%	Belum Tercapai	Melaksanakan Program Dukungan Manajemen pada BPTD Kelas II Jambi	Subbag Tata Usaha

**MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAMBI
BULAN FEBRUARI TAHUN 2024**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-2				Realisasi Bulan-2		Capaian Bulan-2		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Pelaksana / Penanggung Jawab	
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran				
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	Volume	Volume				
SK 1.	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	1. Subsidi operasional angkutan jalan	Jumlah Lintas Angkutan Jalan Perintis	Layanan Angkutan Jalan Perintis	8.3333	100	5.000.000.000	100	8.3333	813.983.460	100%	16,3%	Tercapai	Menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan umum perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut.	- Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan - Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	4	1. Operasional Terminal Penumpang Tipe A : - Terminal Alam Barajo - Terminal Sribulan Sarolangun - Terminal Bangko Merangin - Terminal Bungo	Jumlah Terminal Penumpang Tipe-A dikelola	Pelayanan Transportasi Darat	4	100	8.233.829.000	100	4	831.943.699	100%	10,1%	Tercapai	1. Melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP terkait tugas dan tanggung jawab seluruh staf Terminal Tipe A; 2. Melakukan evaluasi pelaksanaan terkait manajemen SDM; 3. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait tugas dan tanggung jawab serta komitmen untuk pelaksanaan operasional di Terminal Tipe A.	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4	1. Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan : - Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal - Pelabuhan Sungai Ps. Angso Duo - Pelabuhan Sungai Nipah Panjang - Pelabuhan Sungai	Jumlah Pelabuhan SDP	Pengawasan Operasional Pelabuhan SDP	4	100	1.349.070.000	100	4	68.986.350	100%	5,1%	Tercapai	Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait tugas dan tanggung jawab serta komitmen untuk pelaksanaan operasional di Pelabuhan Penyeberangan.	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
SK 2.	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	95	1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	Monitoring Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	95	100	1.354.000.000	100	30	0	32%	0,0%	Belum Tercapai	Melaksanakan monitoring terhadap SPM di Terminal tipe-A	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	100	1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	Monitoring Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	100	100	1.354.000.000	100	30	0	30%	0,0%	Belum Tercapai	Melaksanakan monitoring terhadap SPM di Pelabuhan SDP	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
SK 4.	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	1. Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan 2. Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK) 3. Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional)	Melaksanakan kegiatan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan	Terlaksananya kegiatan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan	100	100	2.032.881.000	100	30	0	30%	0,0%	Belum Tercapai	1. Menginventaris kebutuhan infrastruktur keselamatan jalan; 2. Membangun dan memfasilitasi infrastruktur keselamatan jalan; 3. Melakukan monitoring terhadap fasilitas jalan yang telah terpasang.	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan
											3.090.809.000	100		0	0,0%				
											17.238.124.000	100		670.395.400	3,9%				
		IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	1	1. Operasional UPPKB -UPPKB Jambi Merlung -UPPKB Muara Tembesi -UPPKB Sarolangun -UPPKB Sungai Penuh	Jumlah kendaraan barang yang ditimbang / diperiksa	Menurunnya jumlah kendaraan barang yang melanggar	1	100	6.363.734.000	100	0	795.565.759	0%	12,5%	Belum Tercapai	1. Menyiapkan infrastruktur UPPKB yang memadai; 2. Menyiapkan SDM yang berkompeten	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan
		IKK3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS dan batas kecepatan	Lokasi	10	1. Pembangunan ZoSS di Provinsi Jambi: - Kota Jambi; - Kab. Batanghari - Kab. Merangin - Kab. Bungo - Kab. Tanjab Barat	Melaksanakan Pembangunan ZOSS	Terlaksananya Pembangunan ZOSS	10	100	2.750.000.000	100	0	-	0%	0,0%	Belum Tercapai	Kegiatan tersebut terkena Automatic Adjustment	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan
		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1500	1. Kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan	Melaksanakan Kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan	Terlaksananya Kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan	1500	100	350.000.000	100	0	-	0%	0,0%	Belum Tercapai	Pelaksanaan kegiatan diprioritaskan terlaksana bulan Oktober Tahun 2024	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	80	1. Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Perusahaan Karoseri 2. Pelaksanaan Kalibrasi Peralatan Pengujian	Melaksanakan kegiatan fisik rancang bangun pada perusahaan karoseri dan kegiatan pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian kendaraan bermotor	Terlaksananya kegiatan fisik rancang bangun pada perusahaan karoseri dan kegiatan pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian kendaraan bermotor	80	100	235.000.000	100	20	18.060.000	25%	7,7%	Belum Tercapai	1. Melaksanakan kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Perusahaan Karoseri; 2. Melaksanakan Kalibrasi Alat Uji UPPKB.	Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan
IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Lokasi	1	1. Pengadaan dan pemasangan rambu sungai di sungai Batanghari (100 Unit) termasuk supervisi	Melaksanakan pengadaan dan Pemeliharaan Rambu Sungai	Terlaksananya pengadaan dan Pemeliharaan Rambu Sungai	1	100	1.800.000.000	100	0	-	0%	0,0%	Belum Tercapai	1. Menginventaris kebutuhan fasilitas keselamatan di SDP; 2. Membangun dan memfasilitasi infrastruktur	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan		

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-2				Realisasi Bulan-2		Capaian Bulan-2		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Pelaksana / Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	Volume	Volume			
					2. Pemeliharaan Rambu Sungai dan Danau												keselamatan di SDP; 3. Melakukan monitoring terhadap fasilitas SDP yang telah terpasang.	
SK 5.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis	IKKS.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	1. Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	Melaksanakan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	Terlaksananya Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	90	100	4.143.720.000	100	9	69.230.000	10%	1,7%	Belum Tercapai	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan	Subbag Tata Usaha
SK 1.	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1 Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90	1. Program Dukungan Manajemen	Melaksanakan Program Dukungan dan Manajemen	Terlaksananya Program Dukungan dan Manajemen	90	100	24.118.410.000	100	15	4.458.258.381	17%	18,5%	Belum Tercapai	Melaksanakan Program Dukungan Manajemen pada BPTD Kelas II Jambi	Subbag Tata Usaha

**MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAMBI
BULAN MARET TAHUN 2024**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-3				Realisasi Bulan-3		Capaian Bulan-3		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Pelaksana / Penanggung Jawab	
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran				
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	Volume	Volume				
SK 1.	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	1. Subsidi operasional angkutan jalan	Jumlah Lintas Angkutan Jalan Perintis	Layanan Angkutan Jalan Perintis	8,3333	100	5.000.000.000	100	8,3333	1.200.934.500	100%	24,02%	Tercapai	Menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan umum perintis bagi masyarakat di daerah daerah yang saat ini belum terjangkau untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut.	- Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan - Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	4	1. Operasional Terminal Penumpang Tipe A : - Terminal Alam Barajo - Terminal Sribulan Sarolangun - Terminal Bangko Merangin - Terminal Bungo	Jumlah Terminal Penumpang Tipe-A dikelola	Pelayanan Transportasi Darat	4	100	8.233.829.000	100	4	1.785.887.515	100%	21,69%	Tercapai	1. Melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP terkait tugas dan tanggung jawab seluruh staf Terminal Tipe A; 2. Melakukan evaluasi pelaksanaan terkait manajemen SDM; 3. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait tugas dan tanggung jawab serta komitmen untuk pelaksanaan operasional di Terminal Tipe A.	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4	1. Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan : - Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal - Pelabuhan Sungai Ps. Angso Duo - Pelabuhan Sungai Nipah Panjang - Pelabuhan Sungai	Jumlah Pelabuhan SDP	Pengawasan Operasional Pelabuhan SDP	4	100	1.349.070.000	100	4	107.291.587	100%	7,95%	Tercapai	Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait tugas dan tanggung jawab serta komitmen untuk pelaksanaan operasional di Pelabuhan Penyeberangan.	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
SK 2.	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	95	1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	Monitoring Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	95	100	1.354.000.000	100	82	24.723.492	86%	1,83%	Belum Tercapai	Melaksanakan monitoring terhadap SPM di Terminal tipe-A	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	100	1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	Monitoring Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	100	100	1.354.000.000	100	80	24.723.492	80%	1,83%	Belum Tercapai	Melaksanakan monitoring terhadap SPM di Pelabuhan SDP	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
SK 4.	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	1. Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan 2. Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK) 3. Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional)	Melaksanakan kegiatan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan	Terlaksananya kegiatan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan	100	100	2.032.881.000	100	22	318.000.000	22%	15,64%	Belum Tercapai	1. Menginventarisir kebutuhan infrastruktur keselamatan jalan; 2. Membangun dan memfasilitasi infrastruktur keselamatan jalan; 3. Melakukan monitoring terhadap fasilitas jalan yang telah terpasang.	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan
									3.090.809.000	100	0	0,00%							
									17.238.124.000	100	2.144.831.400	12,44%							
		IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	1	1. Operasional UPPKB -UPPKB Jambi Merlung -UPPKB Muara Tembesi -UPPKB Sarolangun -UPPKB Sungai Penuh	Jumlah kendaraan barang yang ditimbang / diperiksa	Menurunnya jumlah kendaraan barang yang melanggar	1	100	6.363.734.000	100	17,82	1.264.333.434	17,82%	19,87%	Belum Tercapai	1. Menyiapkan infrastruktur UPPKB yang memadai; 2. Menyiapkan SDM yang berkompeten	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan
		IKK3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS dan batas kecepatan	Lokasi	10	Pembangunan ZoSS di Provinsi Jambi: - Kota Jambi; - Kab. Batanghari - Kab. Merangin - Kab. Bungo - Kab. Tanjab Barat	Melaksanakan Pembangunan ZOSS	Terlaksananya Pembangunan ZOSS	10	100	2.750.000.000	100	0	-	0%	0,00%	Belum Tercapai	Kegiatan tersebut terkena Automatic Adjustment	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan
		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1500	1. Kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan	Melaksanakan Kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan	Terlaksananya Kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan	1500	100	350.000.000	100	0	-	0%	0,00%	Belum Tercapai	Pelaksanaan kegiatan diperkirakan terlaksana bulan Oktober Tahun 2024	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	80	1. Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Perusahaan Karoseri 2. Pelaksanaan Kalibrasi Peralatan Pengujian	Melaksanakan kegiatan fisik rancang bangun pada perusahaan karoseri dan kegiatan pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian kendaraan bermotor	Terlaksananya kegiatan fisik rancang bangun pada perusahaan karoseri dan kegiatan pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian kendaraan bermotor	80	100	235.000.000	100	44	34.995.268	55%	14,89%	Belum Tercapai	1. Melaksanakan kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Perusahaan Karoseri; 2. Melaksanakan Kalibrasi Alat Uji UPUBKB.	Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan		

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-3				Realisasi Bulan-3		Capaian Bulan-3		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Pelaksana / Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	Volume	Volume			
		IKK7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Lokasi	1	1. Pengadaan dan pemasangan rambu sungai di sungai Batanghari (100 Unit) termasuk supervisi 2. Pemeliharaan Rambu Sungai dan Danau	Melaksanakan pengadaan dan Pemeliharaan Rambu Sungai	Terlaksananya pengadaan dan Pemeliharaan Rambu Sungai	1	100	1.800.000.000	100	0	-	0%	0,00%	Belum Tercapai	1. Menginventaris kebutuhan fasilitas keselamatan di SDP; 2. Membangun dan memfasilitasi infrastruktur keselamatan di SDP; 3. Melakukan monitoring terhadap fasilitas SDP yang telah terpasang.	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan
SK 5.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis	IKKS.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	1. Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	Melaksanakan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	Terlaksananya Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	90	100	4.143.720.000	100	13,5	265.530.978	15%	6,41%	Belum Tercapai	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan	Subbag Tata Usaha
SK 1.	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1 Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90	1. Program Dukungan Manajemen	Melaksanakan Program Dukungan dan Manajemen	Terlaksananya Program Dukungan dan Manajemen	90	100	24.118.410.000	100	18	8.886.598.402	20%	36,85%	Belum Tercapai	Melaksanakan Program Dukungan Manajemen pada BPTD Kelas II Jambi	Subbag Tata Usaha